



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif yang didasarkan pada: kekayaan alam yang berlimpah, upah tenaga kerja murah, dan posisi strategis, saat ini sulit untuk dipertahankan lagi. Daya saing tidak dapat diperoleh dari misalnya faktor upah rendah atau tingkat bunga rendah, tetapi harus pula diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara berkesinambungan. Porter (1990) mengatakan bahwa faktor keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh keunggulan kompetitif, dengan kemajuan teknologi.

Setiap kawasan unggulan masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu, yaitu adanya inovasi (*innovation*). Sumberdaya alam yang dimiliki saat ini sudah tidak dapat diandalkan lagi karena sudah banyak terkuras. Oleh karena itu yang mengarah pada pembentukan keunggulan daya saing perlu digali dan tentunya setelah itu perlu dan harus diterapkan. Hirarki faktor produksi perlu dibuat untuk mengetahui peranan factor produksi didalam menciptakan keunggulan daya saing produk unggulan yang merupakan potensi suatu kawasan. Untuk menciptakan keunggulan daya saing kawasan, maka jauh lebih baik dan lebih utama melalui mekanisme penciptaan faktor-faktor produksi dibandingkan dengan faktor-faktor yang diwariskan (*business factor*).

Suatu wilayah/kawasan yang sukses dalam industrinya adalah yang mampu menciptakan dan mengembangkan *factor creation* yang dibutuhkan sesuai dengan





potensinya, dan wilayah itu akan memiliki keunggulan daya saing dalam menciptakan faktor-faktor produksi yang terspesialisasi (*specialized factor*). Tidak ada satu wilayah yang dapat menciptakan dan mengembangkan semua tipe dan jenis faktor produksi, penentuan tipe dari faktor produksi yang akan diciptakan dan dikembangkan dan seberapa besar efektifitasnya sangat tergantung pada: (a) Kondisi permintaan lokal, (b) Keberadaan industri dan pendukung industri terkait, (c) Tujuan perusahaan dan karakteristik persaingan domestik.

Oleh karena itu Pemetaan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) merupakan salah satu bentuk pemetaan sentra produksi untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah yang diikuti peningkatan produksi pada sentra-sentra produksi dari sub sektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan dan subsektor peternakan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang relevan.

untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan di daerah, dipandang perlu adanya pemetaan Kawasan Sentra Produksi guna pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah yang dibentuk dalam suatu kawasan sebagai Sentra Pengembangan Produksi berskala kecil (mikro) dan ekonomis. Ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di suatu wilayah, serta pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

1. Mengidentifikasi komoditas unggulan dari setiap sub sector untuk dikembangkan menjadi suatu Kawasan sentra produksi.





2. Mengidentifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra produksi.
3. Melakukan pemetaan kawasan sentra produksi yang bermanfaat untuk pengembangan UKM di Provinsi Maluku Utara sebagai kegiatan usaha untuk peningkatan nilai tambah produk primer yang dihasilkan.
4. Menganalisis daya dukung sumberdaya dalam pengembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara.
5. Menganalisis Strategi Pengembangan UMKM dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1.2.2. Sasaran

Sasaran kegiatan pemetaan kawasan sentra Produksi untuk pengembangan UKM adalah tersedianya informasi tentang:

1. Kawasan Sentra Produksi terpilih, maupun jenis komoditas yang dikembangkan pada kawasan itu.
2. Jumlah dan jenis UKM yang dapat dikembangkan dalam kawasan sentra produksi.
3. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang terdapat pada UKM-UKM dalam kawasan sentra produksi.
4. Jasa pelayanan perbankan dan sistem informasinya mengenai kendala dan persoalan dalam upaya pemberdayaan kegiatan usaha UKM.
5. Prasarana produksi bila mungkin tersedianya jaringan irigasi, listrik, air bersih, telekomunikasi di setiap Kawasan Sentra Produksi.





6. Sistem transportasi dan pola aliran barang dari sentra produksi ke penyimpanan sementara/gudang, ke tempat distribusi barang hingga sampai ke tempat tujuan tujuan (pengolahan, pedagang) maupun pasar sebagai konsumen akhir.
7. Alokasi pasar dan sistem pemasaran dari sentra produksi ke penyimpanan sementara, ke distribusi barang hingga sampai pada tempat tujuan (pengolahan, pedagang) maupun pasar sebagai konsumen akhir.

1.3. Ruang Lingkup

Penentuan Kawasan Sentra Produksi di suatu daerah, diarahkan pada wilayah-wilayah kabupaten/kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, serta harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah itu termasuk pasar. Lingkup kawasan tidak dibatasi dengan batas administratif, tetapi ditentukan oleh fungsinya.

Dengan demikian, maka lingkup kawasan dapat relatif luas dapat terdiri dari bagian-bagian wilayah kecamatan, bisa juga relatif kecil dapat terdiri dari satu atau lebih dari dua bagian wilayah kecamatan dan atau antar kabupaten/kota. Besar kecilnya Kawasan Sentra Produksi tidak terlepas dari pada faktor potensi dan fungsi kawasan jarak geografis. Adanya perbedaan jarak yang panjang memungkinkan perlunya pemisahan kawasan, sedangkan jarak terpendek antar kawasan potensial cenderung membentuk satu kesatuan Kawasan Sentra Produksi.

Dalam kaitannya antara batas administratif dengan faktor jarak geografis terhadap kemungkinan terbentuknya kawasan, ada kemungkinan ditemukannya pemisahan dari suatu wilayah kabupaten dan masuk membentuk kawasan baru di





suatu wilayah kabupaten lain. Kemungkinan ini dapat saja terjadi di seluruh wilayah kabupaten dan kota, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan langsung secara fisik.





BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pengertian Kawasan

Istilah “Kawasan” banyak diungkapkan dalam undang undang dan peraturan- peraturan pemerintah. UU No. 24 Th. 1992 tentang Penataan Ruang dan penjelasannya menyebut beberapa macam kawasan. Kawasan didefinisikan sebagai wilayah dengan fungsi utama *lindung* atau *budidaya* yang meliputi kawasan lindung (mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan), dan kawasan budidaya (didasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan):

Kawasan lindung meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, dan wilayah perbatasan;

Kawasan budidaya meliputi: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan per didikan, kawasan pertahanan keamanan;

Kawasan adalah suatu area yang merupakan satu kesatuan fungsional yang mempunyai suatu jenis kegiatan dominan yang berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya kegiatan lain yang masih dapat dijangkau secara ekonomis.

2.2. Kriteria Kawasan.

Suatu area tertentu yang tidak batasi oleh batas-batas administrasi, tetapi





dibatasi oleh pengaruh kegiatan ekonomi yang dominan dan hasil/ produk dari kawasan tersebut memiliki keunggulan komparatif. Kawasan-kawasan ini mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kapasitas produksi yang signifikan dan berkesinambungan;
2. Terdapat jenis kegiatan ekonomi dominan dalam suatu area;
3. Terdapat kegiatan ekonomi yang menarik berkembangnya kegiatan
4. ekonomi ikutan termasuk pengembangan lembaga permodalan/keuangan;
5. Menghasilkan barang yang mempunyai prospek baik dan daya saing tinggi;
6. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung produksi;
7. Kesiapan sumber daya manusia setempat dalam hal penguasaan teknologi
8. produksi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna;
9. Pemakaian lahan intensif dan sifatnya ekonomi aglomerasi.

2.3. Pengertian Sentra Produk Unggulan

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No: 32/Kep/M.KUKM/IV/2002, tanggal 17 April 2002 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM, SENTRA didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi kluster.

Sentra merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi suatu jenis produk unggulan. *Sentra merupakan area* yang lebih khusus untuk suatu komoditi suatu kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana untuk





berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Di area sentra produksi unggulan tersebut ada satu kesatuan fungsional secara fisik: *lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur, dan kelembagaan dan sumberdaya manusia*, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi. Sentra produk unggulan pada umumnya berkaitan dengan industri, oleh karena itu perlu batasan mengenai perindustrian.

2.4. Pengertian Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadibarang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan insdustri. *Bidang usaha industri* adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.

Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri. *Jasa industri* adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri lainnya. *Kawasan industri* adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola perusahaan kawasan industri, *Izin usaha Kawasan Industri* adalah izin yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, *Perusahaan Kawasan Industri* adalah perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.





Industri sentra, yaitu kelompok industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan usaha yang sejenis. Dari segi pemasarannya kelompok ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dan peran pedagang perantara/pedagang pengumpul menjadi cukup menonjol.

2.5. Definisi Usaha Kecil dan Menengah

Departemen Perindustrian RI pada tahun 1991 mendefinisikan industri kecil dan kerajinan adalah kelompok perusahaan yang dimiliki penduduk Indonesia dengan jumlah nilai aset kurang dari Rp. 600 juta diluar nilai tanah dan bangunan yang digunakannya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 miliar/tahun.
3. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
5. Terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Sedangkan untuk kriteria usaha menengah menurut UU. No. 9 Tahun 1995 adalah:

1. Untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp. 5 miliar, dan





2. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 miliar.

Bank Indonesia mengacu pada definisi yang sesuai dengan UU No. 9 tahun 1995 karena kriteria usaha kecil dan menengah dalam Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan pemberian Kredit Usaha Kecil (PBI No. 3/2/PBI/2001) merujuk pada UU tersebut. Menurut Inpres No. 10 tahun 1999, usaha menengah sebagai unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai maksimal Rp. 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. Instansi lain seperti Depperindag juga mengeluarkan ketentuan mengenai industri skala kecil menengah yang dituangkan dalam Keputusan Menperindag (Kepmenperindag) No. 257/MPP/Kep/7/1997. Definisi UKM dalam Kepmenperindag adalah suatu usaha dengan nilai investasi maksimal Rp. 5 miliar termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan BPS membagi jenis UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu:

1. Kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja dibawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar
2. Usaha Kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 – 9 orang
3. Usaha menengah, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 -99 orang.

Definisi UKM pada tingkat internasional dikeluarkan oleh *World Bank* yang membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu:

1. *Medium enterprise*, dengan kriteria:





- a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - b. Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta, dan
 - c. Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta
2. *Small enterprise*, dengan kriteria:
- a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta, dan
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
3. *Micro Commission*, dengan kriteria:
- a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, dan
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu

2.6. Definisi Klaster

Meski istilah kluster menjadi populer akhir-akhir ini, suatu pemahaman tentang istilah ini tidak mudah didefinisikan. Suatu definisi kerja sering diberikan sebagai “*pemusatan geografis industry-industri terkait dan kelembagaanya*”. Mengingat definisi ini tidak secara jelas mengidentifikasi batas-batas geografis, sehingga meninggalkan sisi keluwesan dalam mengidentifikasi manfaat dikaitkan dengan sifat daripada program tersebut. Klaster dipelajari dari berbagai prespektif. Dari segi strategi bisnis, kluster diidentifikasi atas daerah yang luas disepanjang pertalian-pertalian industry (*Brata, 2003 dan Soetrisno, 2003*).

Sebaliknya, ditinjau dari segi studi pembangunan bahwa kepentingan yang besar diletakkan pada kedekatan geografis, dengan menyoroti sisi kelemahan pertalian industri tersebut di Negara berkembang. Sudah barang tentu kedekatan





geografis secara tradisional dipandang sebagai factor yang paling penting dalam memberi kontribusi terhadap ekonomi eksternal. Namun demikian, pembangunan sarana transportasi - telekomunikasi mengurangi maka pentingnya kedekatan geografis. Para peneliti sekarang sepakat tentang pentingnya mengidentifikasi pertalian-pertalian tanpa mempertimbangkan batas-batas klaster (*Nssah, 2002*).

Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi 2008 – IST AKPRIND Yogyakarta *Klaster* di Indonesia sinonim dengan suatu kluster. Menurut data sensus tahun 1996 terdapat 10.000 *klaster* di Indonesia, 80 % daripadanya mempunyai kurang dari 50 usaha. Jumlah usaha-usaha dalam suatu *klaster*, untuk beberapa jumlah tertentu, merupakan suatu indikator implisit ukuran pasar. Bisa dikatakan bahwa semakin besar *klaster*, semakin besar pentingnya bagi ekonomi regional. Meski kluster-kluster dan *klaster* tidak perlu sinonim, tapi pembahasan ini memusatkan pada penguatan kapasitas kolektif diantara UKM-UKM di dalam *klaster*.

2.7. Pendekatan Penguatan Klaster

Ada 2 pendekatan terhadap pengembangan klaster. Pendekatan yang pertama menargetkan pada daya saing industrial melalui penguatan pertalian-pertalian diantara industri-industri dan lembaga terkait dengan sedikit penekanan pada pemusatan geografis (*Rahayu, 2005*). Pendekatan yang lain justru berupaya memaksimalkan “ekonomi eksternal” yang muncul dari pemusatan geografis UKM-UKM yang beroperasi di dalam sektor yang sama (*Sanusi, 2004*).

Program-program promosi klaster dipandang lebih menguntungkan dibandingkan dengan program-program usaha-usaha individual, tidak hanya karena





efisiensi biayanya tapi juga ekonomi eksternal yang memberikan rentang keuntungan bagi klaster (*Kuncoro, 2002*). Usaha-usaha klaster dapat memperoleh berbagai nilai keuntungan yang bisa ditingkatkan jika mereka aktif meneruskan (*Murphy, 2000*).

Pemusatan geografis UKM dalam klaster akan bisa memacu kesadaran usaha-usaha memasok produk-produk yang diperlukan. UKM-UKM di dalam klaster kemudian berada pada posisi yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan pesanan (*Nasution, 2002*). Pemasaran dan pembelian bersama merupakan contoh tipikal dari tindakan kolektif. Dalam upaya lebih meningkatkan kapasitas kolektif UKM dalam klaster, maka pertalian-pertalian intern disamping juga pertalian-pertalian ekstern dengan pihak-pihak yang berkepentingan diluar hendaknya dipromosikan (*Sallatu dan Suhab, 2003*).

2.8. Klaster Dinamis

Tidak seperti definisi tentang klaster, sedikit peneliti telah mendefinisikan dengan jelas klaster dinamis, misalnya model berlian dari Michael Porter (*1990*) dan model Michael Best (*1999*) yang sering dijadikan rujukan. Model berlian Porter mengidentifikasi empat penentu yang mengarah kepada daya saing industri. Keempat penentu itu:

1. Faktor yang dipersyaratkan (faktor-faktor produksi yang dipersyaratkan seperti bahan baku, buruh, prasarana),
2. Keadaan-keadaan permintaan dalam negeri (kualitas permintaan nasional),
3. Industri terkait dan pendukung (keberadaan industri terkait yang bersaing),
4. Strategi, struktur dan lawan perusahaan.





Best (1999) menyelidiki model berlian dan prosesnya menuju ke klaster dinamis. Model Best menyatakan proses tersebut diawali dari munculnya perusahaan yang berkembang, yang gilirannya secara teknologi menuju ke suatu klaster *spin-off*. Meskipun suatu klaster secara keseluruhan menunjukkan beragam teknologi, ia tetap mempertahankan sifat sistim keterbukaannya dan merangsang usaha lain. Sebagai hasil, selanjutnya masing-masing UKM mendemonstrasikan keunggulannya di dalam proses produksi dan teknologi (Watterberg, dkk, 1999).





BAB III

METODOLOGI

3.1. Lokasi Kegiatan

Studi ini membahas tentang pemetaan kawasan sentra produksi di provinsi Maluku utara. Untuk pengembangan UKM. Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah kecamatan/kabupaten/kota di provinsi Maluku utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan oleh kemungkinan penyebaran potensi sentra-sentra produk unggulan keseluruhan wilayah provinsi Maluku utara.

3.2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pemetaan kawasan sentra produksi untuk pengembangan UKM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Persiapan. Kegiatan ini meliputi persiapan administrasi dan teknis termasuk perekrutan tenaga pelaksana.
2. Survey dan Pengumpulan Data. Survey dilakukan untuk mengidentifikasi sentra produksi komoditas yang ada saat ini. Survei dan observasi lapangan, serta FGD untuk mengumpulkan data – data, baik primer dan sekunder untuk bahan pengkajian dan analisa pengembangan.
3. Pengolahan data dan Analisa, Kegiatan ini meliputi:
 - a. Inventarisasi dan pengujian data;
 - b. Analisis data dan penyajian hasilnya.

3.3. Metode Analisis

1. Kajian deskriptif, yakni metode kajian yang meneliti suatu keadaan dengan tujuan membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan pengkajian serta hubungan antar fenomena





yang diselidiki. Data yang dikumpulkan terdiri atas data sekunder dan data primer. Data primer berasal dari lokasi pengkajian secara langsung, baik yang dilakukan melalui kuesioner, wawancara maupun diskusi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui survey instansional yang berupa peraturan-peraturan, laporan-laporan dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan pengkajian ini. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara: survey instansional, melalui kuesioner bagi responden dan diskusi (FGD).

2. Analisis *location quotient*. Dilakukan untuk mengidentifikasi sektor dan komoditas unggulan dalam yang berpotensi untuk pengembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara.
3. Analisis sistem informasi geografis. Dilakukan untuk memetakan wilayah pengembangan sentra produksi UMKM di Provinsi Maluku Utara.
4. Analisis SWOT. analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi obyek yaitu untuk melihat *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threaten* (ancaman) serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah (Rangkuti, 2004: 19-20):
 - a. Kekuatan (*strength*); kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.
 - b. Kelemahan (*weakness*); segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.





- c. Peluang (*opportunity*); kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan, atau kondisi ekonomi secara global.
 - d. Ancaman (*threaten*); hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.
5. Matriks SWOT. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Adapun cara yang dilakukan adalah:
- a. Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).
 - b. ST : Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha maksimal menjadikan ancaman sebagai peluang (O).
 - c. WO : Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).
 - d. WT : Strategi/alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T)





BAB IV

SEKTOR UNGGULAN

DALAM PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI UMKM

Dalam upaya untuk menciptakan dan atau mengembangkan suatu kawasan sentra produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada suatu daerah, tahapan awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi potensi sektor dan komoditas yang dapat menjadi unggulan dan berpotensi bagi pengembangan sentra produksi yang bersifat berkelanjutan. Kajian sektor dan komoditas basis dalam mendukung pengembangan kawasan sentra produksi UMKM di Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan menggunakan data pangsa relatif pendapatan setiap sektor ekonomi dan data luas produksi komoditas, dimana pendekatan analisis menggunakan analisis *location quotient* (LQ).

Hasil analisis LQ pada Tabel 1 menunjukkan bahwa secara agregat pada level provinsi, Maluku Utara memiliki sektor basis pada sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor ini menjadi basis wilayah dikarenakan pangsa relatif pembentukan pendapatan secara sektoral lebih besar dibandingkan pangasanya secara nasional.





Tabel 1. Sektor Basis / Unggulan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Analisis LQ

Kode	Sumber Ekonomi	LQ	
		2010	2012
1	Pertanian	2,37	2,42
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,39
3	Industri Pengolahan	0,53	0,52
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,75	0,70
5	Bangunan	0,29	0,32
6	Perdagangan, Hotel dan Restorn	1,71	1,84
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,19	1,15
8	Kuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	0,52	0,52
9	Jasa-jasa	0,68	0,65

Sumber : Hasil Analisis LQ, Data Diolah Tahun 2010 dan 2012

Selanjutnya apabila 9 (sembilan) sektor utama yang berkontribusi dalam pembentukan pendapatan wilayah Provinsi Maluku Utara dirinci (*disaggregate*) menjadi 44 (empat puluh empat) subsektor untuk pendalaman analisis LQ secara subsektoral, maka dapat diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) subsektor yang menjadi subsektor unggulan/basis wilayah yaitu antara lain subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, perikanan, barang kayu dan hasil hutan lainnya, air bersih, perdagangan besar dan eceran, angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyebrangan, angkutan udara, sewa bangunan, serta administrasi pemerintahan dan pertahanan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.





Tabel 2. Subsektor Unggulan/Basis Provinsi Maluku Utara Melalui Analisis LQ

No	Subsektor Unggulan/Basis	Nilai LQ	
		2010	2012
1	Tanaman Bahan Makanan	1,25	1,22
2	Tanaman Perkebunan	7,23	7,76
3	Kehutanan	4,12	4,40
4	Perikanan	2,26	2,22
5	Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya	7,80	8,76
6	Air Bersih	3,59	3,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2,10	2,23
8	Angkutan Laut	6,76	7,08
9	Angkutan. Sungai, Danau dan Penyebrangan	1,80	1,82
10	Angkutan Udara	2,11	1,74
11	Sewa Bangunan	0,99	1,03
12	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan	1,51	1,43

Sumber : Hasil Analisis LQ, Data Diolah Tahun 2010 dan 2012

Berdasarkan hasil analisis LQ tentang sektor dan subsektor unggulan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dan 2 di atas, maka untuk kepentingan pengembangan kawasan sentra produksi UMKM di Provinsi Maluku Utara dapat teridentifikasi 11 (sebelas) bidang usaha utama pengembangan sentra produksi UMKM yaitu :

1. Usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komoditi tanaman bahan makanan yaitu tanaman pangan dan tanaman hortikultura.
2. Usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komoditi tanaman perkebunan.





3. Usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komoditi kehutanan.
4. Usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komoditi perikanan.
5. Usaha mikro, kecil dan menengah berbasis industri pengolahan hasil kehutanan.
6. Usaha mikro, kecil dan menengah bidang penyediaan air bersih.
7. Usaha mikro, kecil dan menengah bidang perdagangan baik skala besar maupun eceran.
8. Usaha mikro, kecil dan menengah bidang jasa penyediaan sarana prasarana maupun jasa perbengkelan yang menunjang perkembangan angkutan laut.
9. Usaha mikro, kecil dan menengah bidang jasa penyediaan sarana prasarana yang menunjang perkembangan angkutan udara.
10. Usaha mikro, kecil dan menengah bidang jasa penyediaan sarana prasarana maupun jasa perbengkelan yang menunjang perkembangan angkutan sungai danau dan penyebrangan.
11. Usaha mikro, kecil dan menengah bidang jasa sewa bangunan maupun bidang property dan real estate.

Kesebelas bidang pengusahaan UMKM di atas merupakan usaha potensial yang dapat dikembangkan untuk mendukung penyerapatan tenaga kerja, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat maupun pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dan tentunya melalui model pengembangan yang tepat diantaranya yaitu pengembangan kawasan sentra produksi.





BAB V

POTENSI DAN SENTRA PRODUK UNGGULAN UMKM DI PROVINSI MALUKU UTARA

Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Sentra merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi suatu kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk kepentingan pemetaan kawasan sentra produksi bagi pengembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara, setelah melalui tahapan pengumpulan data dan analisis maka telah teridentifikasi potensi dan sentra usaha mikro kecil dan menengah di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Sentra produksi unggulan merupakan satu kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur, serta kelembagaan dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing.

5.1. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kota Ternate

Kota Ternate dalam aktifitas perekonomiannya berdasarkan beberapa analisis dan perkembangannya merupakan suatu wilayah yang didominasi oleh





peranan sektor sekunder dan tersier. Perkembangan industri di Kota Ternate cukup pesat terutama yang berskala kecil dan menengah.

Industri yang berkembang di Kota Ternate adalah jenis industri kecil dan rumah tangga. Jenis industri ini cukup banyak di wilayah ini karena penggunaan teknologi yang relative sederhana dan keterbatasan aspek permodalan. Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate.

Tabel 3. Jumlah Industri Unggulan Menurut Bidang Usaha di Kota Ternate Tahun 2012

No	Jenis Industri	Jumlah Usaha (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1	Industri Bidang Pangan	43	140	403.749.000.
2	Industri Bidang Kimia dan Bahan Bangunan	45	268	998.402.000.
3	Industri Bidang Sandang, Kulit dan Kerajinan Umum	12	33	134.015.000.
4	Industri Bidang Logam	3	30	230.150.000.
Total		103	471	1.766.316.000.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate





Jenis industri yang berkembang di Kota Ternate adalah industri di bidang pangan, industri di bidang kimia dan bahan bangunan, industri bidang sandang, kulit dan kerajinan umum, serta industri bidang logam. Secara terinci mengenai potensi industri berskala UMKM di Kota Ternate dapat dilihat pada Tabel 3 di atas. Dari keempat bidang usaha industri tersebut, industri yang memiliki nilai investasi tinggi dan memiliki kemampuan penciptaan kesempatan kerja yang baik adalah industri bidang kimia dan bahan bangunan serta industri bidang pangan.

Secara kewilayahan kecamatan, perkembangan UMKM di Kota Ternate sangat pesat. Kecamatan yang sangat intens pertumbuhan UMKM adalah berada pada wilayah Kecamatan Ternate Utara sebanyak 3120 usaha dan Kecamatan Ternate Selatan sebanyak 2466 usaha (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Perkembangan UMKM Per Kecamatan di Kota Ternate

No	Kecamatan	2012	2013
1	Ternate Utara	2706	3120
2	Ternate Tengah	1302	1302
3	Ternate Selatan	2197	2466
4	Pulau Ternate	229	603
5	Kota Moti	308	308
6	Pulau Batang dua	81	189
7	Pulau Hiri	294	294
	Jumlah	7117	8282

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate





Secara terperinci, empat bidang industri berskala mikro kecil dan menengah yang tumbuh di Kota Ternate dapat dilihat pada Tabel 5, 6, 7, dan 8. Industri skala mikro kecil dan menengah bidang pangan yang tumbuh pesat di Kota Ternate adalah usaha roti, usaha pengasapan ikan dan usaha minuman ringan. Sedangkan dilihat dari daya serap tenaga kerja per unit usaha, terdapat tiga jenis usaha yang berdaya serap tenaga kerja tinggi yaitu usaha es balok, usaha tahu tempe, dan usaha minuman sari buah.

Tabel 5. Potensi Industri Mikro Kecil dan Menengah Bidang Pangan di Kota Ternate

No	Jenis Industri Skala UMKM	Jumlah Usaha (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1.	Pengasapan Ikan	6	13	20.385.000
2.	Mi Kering	2	5	30.850.000
3.	Roti	13	32	116.110.000
4.	Es Balok	1	12	1.500.000
5.	Tahu/Tempe	3	24	41.050.000
6.	Minuman Sari Buah	1	8	1.400.000
7.	Minuman Ringan	6	12	143.765.000
8.	Cuka Makan	1	2	380.000
9.	Pati Ubi Kayu	3	13	11.169.000
10.	Kripik Singkong dan Tapioka	2	7	2.790.000
11.	Abon Ikan	2	5	2.800.000
12.	Lain-lain	3	7	31.550.000
Total		43	149	403.749.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Tahun 2012





Pada industri mikro kecil dan menengah bidang kimia dan bahan bangunan, usaha yang tumbuh pesat di Kota Ternate adalah usaha bata semen, usaha percetakan dan fotocopy, dan usaha kusen kayu. Dilihat dari aspek daya serap tenaga kerja per unit industri, usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi di Kota Ternate adalah usaha perabot kayu, usaha bata semen, dan usaha meubel kayu. Secara terinci keadaan potensi industri mikro kecil dan menengah bidang kimia dan bahan bangunan di Kota ternate dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Potensi Industri Mikro Kecil dan Menengah Bidang Kimia dan Bahan Bangunan di Kota Ternate

No	Jenis Industri Skala UMKM	Jumlah Usaha (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1	Kusen Kayu	5	14	68.275.000.
2	Perabot Kayu	1	16	17.800.000.
3	Meubel Bambu	2	9	12.000.000.
4	Percetakan dan Fotokopi	12	47	514.550.000.
5	Genteng	1	3	63.000.000.
6	Bata Semen	21	168	314.116.000.
7	Bata Merah	1	4	2.441.000.
8	Pembuatan Profil Gypsum Plafon	1	4	3.050.000.
9	Pembuatan Profil Batu Angin, Pot Bunga	1	3	3.170.000.
Total		45	268	998.402.000.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Tahun 2012





Tabel 7. Potensi Industri Mikro Kecil dan Menengah Bidang Sandang, Kulit dan Kerajinan Umum di Kota Ternate

No	Jenis Industri Skala UMKM	Jumlah Usaha (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1	Penjahitan	8	21	48.315.000.
2	Tenun Songket	1	5	75.000.000.
3	Kain Gorden	3	7	10.700.000.
Total		12	33	134.015.000.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Tahun 2012

Untuk industri mikro kecil dan menengah bidang sandang, kulit dan kerajinan umum di Kota Ternate sebagaimana terlihat pada Tabel 7 di atas, terdapat tiga jenis usaha yang berkembang yaitu usaha penjahitan, usaha tenun songket, dan usaha kain gorden. Dari ketiga jenis usaha tersebut, usaha penjahitan lebih berkembang dengan daya serap tenaga kerja yang besar di Kota Ternate.





Tabel 8. Potensi Industri Mikro Kecil dan Menengah Bidang Logam di Kota Ternate

No	Jenis Industri Skala UMKM	Jumlah Usaha (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)
1	Pembuatan Kapal dan Perahu	1	20	175.000.000.
2	Pembuatan dan Maintenance Kapal	1	7	37.000.000.
3	Alat Dapur dari Alumunium	0	0	-
4	Etalase dari Alumunium	1	3	18.150.000.
	Jumlah	3	30	230.150.000.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Tahun 2012

Untuk industri mikro kecil dan menengah bidang logam di Kota Ternate (lihat Tabel 8), terdapat tiga jenis usaha yaitu usaha pembuatan kapal dan perahu, usaha alat dapur dari aluminium, usaha pembuatan dan maintenance kapal, dan usaha etalase dari aluminium. Industri yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi pada bidang logam di Kota Ternate adalah industri pembuatan kapal dan perahu.

5.2. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumberdaya yang besar dalam mendukung pengembangan sentra produksi UMKM. Sampai pada tahun 2012, terdapat 804 jumlah industri kecil dan menengah yang tumbuh dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.335 orang. Pertumbuhan industri mikro kecil dan





menengah di Kota Tidore Kepulauan, tersebar secara merata pada tiap wilayah kecamatan dimana kecamatan yang pesat perkembangan Industri skala UMKM adalah Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Utara. Secara geografis Kecamatan Tidore berada di pusat Ibu Kota Tidore Kepulauan sedangkan Kecamatan Tidore Utara lebih dekat dengan wilayah Kota Ternate. Secara lengkap dapat terlihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan

No	Kecamatan	Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	Tidore Timur	60	153
2	Tidore	184	452
3	Tidore Selatan	120	279
4	Tidore Utara	176	584
5	Oba	71	224
6	Oba Selatan	40	150
7	Oba Utara	117	344
8	Oba Tengah	36	149
Total		804	2.335

Sumber : Dinas Perindagkopukm Kota Tidore Kepulauan, 2012





Untuk wilayah Kota Tidore Kepulauan terdapat 7 produk unggulan wilayah yang memiliki beberapa sentra produksi, dimana secara merata tersebar pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel 10. Produk-produk pada sentra produksi Kota Tidore Kepulauan antara lain furniture dari kayu, kerajinan bambu, industri kue/roti, minyak kelapa, percetakan batu bata, sagu pati ubi kayu, dan nasi bambu / nasi jaha.

Tabel 10. Sentra Produksi UMKM di Kota Tidore Kepulauan

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Furniture dari Kayu	Tidore Timur	Kalaodi, Mafututu, Dowora, Tosa,
		Tidore	Gamtufange, Soadara, Indonesiana, Seli, Tomagoba, Gurabunga, Soasio, Soadara, Topo, Topogam,
		Tidore selatan	Tomalou, Tuguiha, Tungwai, Gurabati, Dokiri,
		Tidore Utara	Bobo, Mareku, Ome, Afa-Afa, Sirongo, maitara, Rum
		Oba	Payahe, weda, gita, Koli, kusunopa,
		Oba selatan	Nuku, lifofa, maidi, hager, tagala,
		Oba Utara	Durian, galala, Balbar, guraping, bukit durian, sofifi, Oba, kaiyasa, akekolano,
		Oba Tengah	Togeme, akegurafi
2	Kerajinan Bambu	Tidore Timur	Dowora, Kalaodi,
		Tidore	Tomagobe





Lanjutan Tabel 10.

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa/Kelurahan
3	Industri Roti/Kue	Tidore Timur	Tosa, Dowora, Mafutu, Kalaodi,
		Tidore	Topotiga, Soasio, Topogan, Soasio, Gamtufange, Seli, Soadara, Gurabunga, Tomagoba, Indonesiana,
		Tidore selatan	Tuguiha, Tomalau, Dokiri, Toloa, Tungwai, Gurabati
		Tidore Utara	Bobo, Mareku, Ome, Fobaharu, Afa-Afa, Matara Selatan, Rum, Folaraha, Gubukusuma, Maitara,
		Oba	Kususinopa, Payahe, Koli.
		Oba Selatan	Wawa, Maidi, Lifofa, Hager, Nuku, Tagalaya.
		Oba Utara	Guraping, Akekolano, Oba, Somahode, Kaiyasa, Bukit Durian, Sofifi, Bukulasa
		Oba Tengah	Aketololo
4	Minyak Kelapa	Tidore Timur	Tosa, Dowora
		Oba	Koli
		Oba Selatan	Lifofa, Hager, Nuku
		Oba Tengah	Akelamo



**Lanjutan Tabel 10.**

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa/Kelurahan
5	Percetakan Batu Bata	Tidore Timur	Dowora
		Tidore	Gamtufkange, Indonesiana, Goto, Tomagoba,
		Tidore Selatan	Tungwai
		Tidore Utara	Mareku, Maitara, Rum
6	Sagu Pati Ubi Kayu	Tidore Timur	Mafulutu, Dowora, Tosa
		Tidore	Topogam, Gamtufkange, Gurabunga,
		Tidore Selatan	Tuguiha
		Tidore Utara	Bobo, Mareku, Jaya, Sirongo, Gubukusuma, Maitara, Rum
		Oba	Woda, Eoda, Kosa
		Oba Selatan	Tagalaya, Wama, Harger.
		Oba Utara	Guraping, Somahode, Oba, Kaiyasa, Ampera
Oba Tengah	Beringin jaya, Akelamo, Lola, Aketobololo		
7	Nasi Jaha	Tidore Timur	Dowora, Tosa, Mafulutu
		Tidore Utara	Mareku, Rum
		Oba Utara	Guraping

Sumber : Dinas Perindagkopukm Kota Tidore Kepulauan, 2012

5.3. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Halmahera Utara

Di Kabupaten Halmahera Utara terdapat 5 jenis industri mikro kecil dan menengah yang telah tumbuh dan berkembang yaitu IKM bidang pangan, IKM bidang bahan bangunan dan kimia, IKM bidang logam elektronik, IKM bidang





sandang dan kulit, dan IKM bidang kerajinan dan umum. Berdasarkan data pada Tabel 11, sepanjang tahun 2009 s.d. 2012 terdapat dua industri yang tumbuh dengan pesat di Kabupaten Halmahera Utara yaitu bidang pangan dan bidang bahan bangunan dan kimia.

Tabel 11. Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Industri	2009	2010	2011	2012
1	Pangan	231	215	218	215
2	Bahan bangunan dan kimia	136	116	116	116
3	Logam elektronik	74	92	92	92
4	Sandang dan kulit	20	21	21	21
5	Kerajinan dan umum	25	21	21	21
Jumlah		486	465	468	465

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan ab. Halmahera utara

Tabel 12. Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	Tobelo	690
2	Tobelo Utara	103
3	Tobelo Tengah	193
4	Tobelo Selatan	190
5	Tobelo Barat	92
6	Tobelo Timur	79
7	Galela	97
8	Galela Selatan	108
9	Galela Barat	107
10	Galela Utara	140
11	Kao	225
12	Kao Utara	142





Lanjutan Tabel 12.

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)
13	Kao Barat	112
14	Kao Teluk	57
15	Malifut	190
16	Loloda Utara	112
17	Loloda Kepulauan	71
	Jumlah Total	2.708

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 12 di atas, secara administrasi kecamatan, industri skala mikro kecil dan menengah lebih tumbuh pada wilayah Kecamatan Tobelo sebanyak 690 unit, Kecamatan Kao sebanyak 225 unit, Kecamatan Tobelo Tengah sebanyak 193 unit, serta Kecamatan Tobelo Selatan dan Kecamatan Malifut masing-masing sebanyak 190 unit.

Sentra produksi unggulan UMKM di Kabupaten Halmahera Utara tumbuh dengan produk unggulan adalah anyaman, *virgin coconut oil* (VCO), Gula Aren, Minyak Kelapa, Pengasapan/Pengeringan Ikan, dan Arang Tempurung. Jika dilihat dari jenis produk tersebut pada dasarnya merupakan industri yang berbasis pada pertanian. Secara lengkap data sentra produksi pada tiap kecamatan dan persebarannya di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara dapat terlihat pada Tabel 13 berikut.





Tabel 13. Sentra Produksi UMKM Perkecamatan di Kabupaten Halmahera Utara

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
1	Anyaman	Tobelo Selatan	Gamhoku
		Loloda	Dorume
		Tobelo Selatan	Kakara-B
		Tobelo Utara	Gorua, Popilo, Ruko, Wari
		Malifut	Malapa
		Kao	Kao
2	VCO	Tobelo	Gura, Gosoma
		Tobelo Tengah	Wosia
		Galela Selatan	Togawa, igabula, soakonora
3	Gula aren	Galela utara	Saluta, Salimuli, Limau Dodowo
		Tobelo Utara	Luari
4	Minyak Kelapa	Tobelo	Gosoma,
		Tobelo utara	Gorua Utara, Tolonuo Selatan
5	Pengasapan/pengeri- ngan Ikan	Tobelo Utara	Gorua Utara, Tolonuo Selatan
6	Arang Tempurung	Galela barat	Duma
		Tobelo selatan	Kakara-B, Kupa-Kupa
		Tobelo	MKCM

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan ab. Halmahera Utara Tahun 2012





5.4. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan

Industri kecil menengah yang tumbuh di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 8 jenis usaha yaitu industri makanan, industri minuman, industri pakaian jadi, industri gabus/barang anyaman dari bambu dan rotan, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri furniture, industri reparasi dan pemasangan mesin. Dari kedelapan jenis usaha tersebut, jenis industri mikro kecil dan menengah yang tumbuh pesat di Kabupaten Halmahera Selatan adalah industri makanan sebanyak 326 unit diikuti oleh industri gabus/barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya sebanyak 67 unit usaha. Sedangkan industri yang sangat sedikit persebarannya di Kabupaten Halmahera Selatan adalah industri minuman dan industri furniture dari kayu, sebagaimana terlihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Halmahera Selatan

No	Jenis Industri Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah (Unit)
1	Industri makanan	326
2	Industri minuman	11
3	Industri pakaian jadi	16
4	Industri gabus/barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya	67
5	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	27
6	Industri furniture	14
7	Industri pengolahan lainnya	15
8	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	42
9	Jumlah	518

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012





Sedangkan perkembangan indutsri perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini, dimana Kecamatan Bacan sebanyak 43 unit merupakan wilayah yang paling tumbuh dalam UMKM, diikuti Kecamatan Bacan Barat Utara, Makian Barat, dan Obi Selatan masing-masing 22 unit. Sedangkan wilayah yang keberadaan UMKM sangat kurang adalah Kecamatan Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Bacan Barat, Gane Timur Selatan dan Mandioli Selatan.

Tabel 15. Perkembangan UMKM Perkecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan

No	Kecamatan	Jumlah UMKM (Unit)	No	Kecamatan	Jumlah UMKM (Unit)
1	Bacan	43	16	Kayoa	16
2	Bacan Selatan	16	17	Kayoa Barat	9
3	Bacan Timur	14	18	Kayoa Utara	10
4	Bacan Timur Tengah	3	19	Kayoa Selatan	6
5	Bacan Timur selatan	1	20	Gane Barat	7
6	Bacan Barat	4	21	Gane Barat Utara	15
7	Bacan barat Utara	22	22	Gane Barat Selatan	21
8	Botang Lomang	16	23	Gane Timur	13
9	Mandioli Utara	10	24	Gane Timur tengah	7
10	Mandioli Selatan	5	25	Gane Timur selatan	4
11	Kasiruta Timur	8	26	Obi Utara	19
12	Kasiruta Barat	8	27	Obi Barat	13
13	Kepulauan Joronga	21	28	Obi	19
14	Pulau Makian	16	29	Obi Timur	9
15	Makian barat	22	30	Obi Selatan	22
Total = 399 unit usaha industri mikro kecil dan menengah					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012





Meskipun Kabupaten Halmahera Selatan memiliki beberapa usaha berskala UMKM dan tersebar pada setiap wilayah kecamatan, kabupaten ini mengunggulkan 7 produk UMKM berbasis industri yang memiliki sentra produksi pada beberapa kecamatan dan desa sebagaimana terlihat pada Tabel 16. Sentra-sentra produksi yang tumbuh antara lain sentra produksi batu bacan, sentra produksi gula aren, sentra produksi pengolahan ikan (kerupuk ikan/kamplang, abon ikan, ikan asap, ikan asin, dan babyfish kering), sentra produksi sagu singkong, sentra produksi kerajinan anyaman, sentra produksi pengolahan kelapa, dan sentra produksi sagu rumbia.

Tabel 16. Sentra Produksi Industri Skala UMKM Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
1	Batu bacan	Bacan Kasiruta barat	Amasing Kota, Doko
2	Gula Aren	Bacan Selatan Bacan Timur Bacan timur selatan Botang lomang Gane barat	Papaloang Timlonga Wayaua Tanjung Obit Doro, cango, Koititi, Bumi rahmat
3	Pengolahan Ikan (kerupuk ikan, abon ikan, ikan asap, ikan asin, babyfish kering)	Bacan Bacan Selatan Kepulauan Joronga Kayoa	Amasing kota, sumae, Mandaong, Tembal, Pulau Gala Lelei, laigoma, Gunange
4	Sagu Singkong	Bacan Barat Mandioli utara Kepulauan Jorongan Kayoa Kayoa barat Kayoa utara	Wiring Waya, Pelita, loleo Ngusu Kurungan, Tawabi, Yomen Bajo, Gurapu, Tawabi, Gurapin Boki make, fafao, Loromabati, Madayama,





Lanjutan tabel 16.

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
		Kayoa Selatan Gane barat Gane Barat utara Gane barat Selatan Gane Timur Tengah Gane Timur selatan Obi Timur	Ngute-ngute, Lalin, Posi-posi Saketa, Koititi, Doro Tokaka, Dowora Taba Hidayat, Luin, Gaimu Kelo, Sosepe, Woi
5	Kerajinan Anyaman	Gane barat Selatan Gane Timur Obi Utara Obi barat Obi Obi Timur Obi Selatan	Jibudu, Foya Cap, galala, Tapa, Aer Mangga, Sum Wayaloar, Bobo, Loleo, Fluk, Gambaru, Ocimalaleo Indomut, Sumae, Sabatang, Kasubibi
6	Pengolahan Kelapa	Bacan Bacan timur Bacan barat Bacan barat Utara Botang Lomang Mandioli utara Mandioli selatan Kasiruta Timur Pulau Makian Makian barat Kayoa Utara Gane Barat utara Gane barat Selatan Gane Timur Gane timur tengah	Joame, yaba, sidopo, Nusa Babulah, gane baru, gane lama, Golalang Prapakanda, kampong baru Leloe neusu, akedabo, Neuta Waya, Indong, Pelita Tabalema, Jiko, galala Kasiruta dalam, Leleo jaya, makituso, Gitang, Talapao, Rabut daiyo, Tegono, Ngokomalako, Loromabati Sukadamah, Bosso Pasipalele, Awis, gane dalam, Tawa, Sekli, Dowora, Yamli Tobaru, katalow, Foya, Kebun raja Lelewi, bisui





No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
		Gane timur Selatan	Sawat
		Obi Selatan	Mano, gambaru, Soligi
		Bacan	Awanggo, Indomut, sumae,
		Bacan barat	Indari, wiring,
		Bacan Barat utara	Jojame, sidopo, Nusa babulah, geti Baru, Geti lama, Gilalang
		Mandioli Selatan	Yoyok
		Kasiruta Timur	Kasiruta dalam, Tawa, Tutuhu
		Kayoa	Karamat, lelei
		Gane Barat u ara	Dolik, Bosso, Fulai,
		Gane barat selatan	Sekli
		Gane timur tengah	Lelewi
		Gane timur selatan	Ranga-ranga, kuwo
7	Sagu Rumbia		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012

5.5. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Halmahera Barat

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sangat agraris sehingga industri skala mikro kecil dan menengah yang tumbuh merupakan pengolahan bahan baku pertanian. Terdapat tiga jenis industri yang berkembang yaitu industri makanan dan minuman, industri kulit/barang dari kulit dan alas kaki, serta industri kayu, barang-barang dari kayu dan barang anyaman dari rotan dan bambu sebagaimana terliha pada Tabel 17 berikut.





Tabel 17. Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Halmahera Barat

No	Jenis Industri Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah (Unit)
1	Makanan dan minuman	84
2	Kulit/ barang dari kulit, alas kaki	21
3	Kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk frnitur) dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya	180
	Jumlah	285

Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, DDA Tahun 2012

Tabel 18. Kondisi UMKM Perkecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jailolo	195
2	Jailolo Selatan	43
3	Jailolo Timur	9
4	Sahu	46
5	Sahu Timur	16
6	Ibu Selatan	16
7	Ibu tengah	39
8	Ibu Utara	18
9	Loloda	17
	Jumlah	399

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan ab. Halmahera Barat Tahun 2012





Dirinci menurut wilayah kecamatan, terdapat 399 usaha mikro kecil dan menengah baik industri maupun non industri yang tumbuh di Kabupaten Halmahera Barat. Dimana Kecamatan Jailolo, Kecamatan Sahu dan Kecamatan Jailolo Selatan merupakan wilayah yang pesat dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

5.6. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Halmahera Timur

Terdapat 9 jenis usaha yang teridentifikasi berkembang di Kabupaten Halmahera Timur dalam kategori industri mikro kecil dan menengah, dimana industri makanan dan minuman masih menjadi pioner seperti kabupaten/kota lainnya. Berikut ini akan ditampilkan jumlah usaha menurut industri pada Kabupaten Halmahera Timur. Dari Tabel 19 berikut, terlihat bahwa industri makanan dan minuman merupakan industri dengan jumlah terbesar yang ada di Halmahera Timur yaitu 201 unit dan yang paling sedikit adalah industri daur ulang hanya sebanyak 2 unit, dan total industri mikro kecil dan menengah yang tumbuh di tahun 2012 sebanyak 523 unit.





Tabel 19. Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Halmahera Timur

No	Jenis Industri Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah (Unit)
1	Industri makanan dan minuman	201
2	Industri pakaian jadi	65
3	Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk <i>furniture</i>), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya	58
4	Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman	50
5	Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya	1
6	Industri radio, televisi dan peralatan komunikasi, serta perlengkapannya	15
7	Industri kendaraan bermotor	73
8	Industri furniture dan pengolahan lainnya	71
9	Daur ulang	2
	Jumlah	523

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Timur Tahun 2012

Sedangkan Jumlah industri erdasarkan persebarannya perkecamatan sebagaimana dilihat pada Tabel 20, diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu industri hasil pertanian dan kehutanan dan industri aneka. Kecamatan Maba merupakan wilayah yang sangat besar perkembangan industri mikro kecil menengah dimana terdapat 114 unit usaha terdiri dari 42 unit bidang industri pertanian dan kehutanan dan 72 bidang industri aneka. Diikuti oleh Kecamatan Wasile sebanyak 91 unit usaha yang terdiri atas 45 unit bidang industri pertanian





dan kehutanan dan 46 bidang usaha industri aneka. Secara keseluruhan, industri aneka lebih mendominasi dengan persentase 56,5% dari total industri yang tumbuh.

Tabel 20. Jumlah Industri Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Industri hasil Pertanian dan kehutanan	Industri aneka
1	Maba selatan	32	40
2	Kota Maba	37	38
3	Maba	42	72
4	Maba Tengah	6	14
5	Maba Utara	18	24
6	Wasile Utara	8	12
7	Wasile Tengah	8	17
8	Wasile Timur	41	35
9	Wasile	45	46
10	Wasile Selatan	27	45
	Jumlah	264	343

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Timur Tahun 2012

Kabupaten Halmahera Timur memiliki 8 sentra produksi unggulan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa yaitu sentra produksi furniture dari kayu, sentra produksi minyak goreng kelapa, sentra produksi penggilingan padi dan penyosohan beras, sentra produksi tahu kedelai, sentra produksi barang anyaman dari rotan dan bambu, sentra produksi barang anyaman bukan rotan dan bambu, sentra produksi pengolahan sagu, dan sentra produksi penggaraman dan





pengeringan ikan, yang secara keseluruhan berbasis pertanian. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Sentra Produksi Industri Skala UMKM Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Halmahera Timur

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
1	Furniture dari kayu	Kota Maba,	Maba sangaji, Tewil, Soalaipoh, Soagimalaha
		Maba	Wayafli
		Maba selatan	Peteley, Waci, Peteley, , Gotowasi, Bicoli, Kasuba, Loleolamo
		Wasile	Bumi restu
		Wasile selatan	Minamin, Loleba
		Wasile timur	Dodaga, akedaga, Toboino Akedaga, Subaim
		Maba Utara	Pumlanga
		Maba selatan	Bicoli, Waci, Loleolamo, Gotowasi, Kasuba, Peteley
2	Minyak Goreng Kelapa	Wasile selatan	Saolat, bakito
		Kota Maba	Soagimalaha
		Maba Utara	Lolasita
		Wasile timur	Akedaga, Waka Jaya
		Wasile	Bumi restu, Mekar Sari, Cemara Jaya
3	Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	Wasile	Cemara jaya, bumi restu
		Wasile timur	Tutuling jaya





Lanjutan Tabel 21.

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
4	Tahu Kedelai	Wasile	Akedaga
		Wasile timur	Toboino
		Wasile selatan	Buli karya
		Maba	Buli
5	Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Wasile Timur	Dakaino
6	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	Kota Maba,	Wailukum
		Maba	Buli Asal, Buli
7	Pengolahan Sagu	Maba Selatan	Peteley, Bicoli
		Kota Maba	Maba Sangaji
8	Penggaraman/Pengeringan Ikan	Maba Selatan	Waci, Gotowasi
		Maba	Buli Karya
		Maba Selatan	Gotowasi, Bicoli, Kasuba

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan ab. Halmahera Timur Tahun 2012

5.7. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Halmahera Tengah

Berdasarkan hasil perolehan dan analisis data, usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dikategorikan dalam 4 bidang usaha yaitu bidang perdagangan, bidang industri pertanian, bidang industri non pertanian, dan bidang aneka jasa, sebagaimana terlihat pada Tabel 22.





Tabel 22. Perkembangan UMKM Menurut Bidang Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah

No	Kecamatan	Kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
		Bidang Perdagangan	Bidang Industri Pertanian	Bidang Industri Non Pertanian	Bidang Aneka jasa
		Unit	Unit	Unit	Unit
1	Weda	201	7	0	10
2	Weda Selatan	54	1	1	6
3	Weda Utara	40	9	0	4
4	Weda Tengah	25	0	0	2
5	Pulau Gebe	37	3	0	1
6	Patani	41	1	1	2
7	Patani Utara	152	4	1	5
8	Patani Barat	21	0	0	1
	Jumlah	571	3	-	31

Sumber: BPS Kab. Halmahera Tengah, DDA Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 22, terlihat bahwa UMKM bidang perdagangan lebih berkembang dan menjadi tumpuan sebagian masyarakat untuk bekerja. Sementara UMKM bidang industri tumbuh pada bidang industri pertanian dengan perkembangan terbesar kegiatan pada Kecamatan Weda Utara sebanyak 9 unit serta pada Kecamatan Weda sebanyak 7 unit, diikuti Kecamatan Patani Utara 4 unit, Kecamatan Pulau Gebe 3 unit, serta Kecamatan Weda Selatan dan Kecamatan Patani masing-masing terdapat 1 unit usaha.

Saat ini Kabupaten Halmahera Tengah memiliki beberapa sentra produksi industri berskala UMKM dengan basis pada bidang pertanian, yaitu antara lain sentra produksi minyak kelapa di Kecamatan Weda, Weda Utara, Patani Utara dan Pulau Gebe, sentra produksi pati sagu di Kecamatan Patani Utara dan Weda Utara,





dan sentra produksi meubel di Kecamatan Weda Selatan, Patani Utara, Patani, Weda Utara, dan Pulau Gebe, sebagaimana terlihat pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Sentra Produksi Industri Skala UMKM Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Halmahera Tengah

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Minyak Kelapa	Weda	Lelilef Sawai, Were, Fidi jaya, Nurweda, Loleo, Nusliko
		Weda Utara	Yeke, Waleh, Sagea
		Patani Utara	Gemia
		Pulau Gebe	Kacepi, Umera
2.	Pati Sagu	Patani Utara	Peniti
		Weda Utara	Messa, Sagea, Trans Waleh, waleh, Lelilef Waibule
3.	Meubel	Weda Selatan	Loleo
		Patani Utara	Masure, Tepeleo
		Patani	Yeisowo
		Weda Utara	Yeke
		Pulau Gebe	Kapaleo
4.	Perbengkelan	Weda Selatan	Kluting Jaya
		Patani	Banemo
		Patani Utara	Tepeleo

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan ab. Halmahera Tengah Tahun 2012

5.8. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula dalam pengembangan industrinya memiliki tiga jenis industri skala mikro kecil dan menengah yaitu industri pangan sebanyak 44 unit, industri sandang dan kulit sebanyak 46 unit serta industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 140 unit, sebagaimana terlihat pada Tabel 24.





Tabel 24. Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Kepulauan Sula

No	Jenis Industri Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah
1	Industri pangan	44
2	Industri sandang dan kulit	46
3	Industri kimia dan bahan bangunan	140
	Jumlah	230

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sula Tahun 2012

Jika dirinci menurut persebaran di tiap wilayah kecamatan dan desa, UMKM yang berkembang baik dalam bidang industri maupun non industri sebanyak 1095 unit. Data pada Tabel 25 menunjukkan bahwa Kecamatan Sanana merupakan wilayah besar pertumbuhan UMKM yakni pada Tahun 2012 sebanyak 277 unit usaha, diikuti oleh Kecamatan Mangoli Barat dan Kecamatan Taliabu Barat masing-masing sebanyak 94 unit usaha.

Tabel 25. Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kabupaten Sula

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)	No	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	Sanana utara	44	11	Mangoli Barat	55
2	Sanana	277	12	Mangoli utara	94
3	Sulabesi Tengah	79	13	Taliabu Timur	22
4	Sulabesi barat	46	14	Taliabu Utara	77
5	Sulabesi selatan	20	15	Lede	50
6	Sulabesi Timur	66	16	Taliabu Barat Laut	17
7	Mangoli Selatan	10	17	Taliabu Barat	94
8	Mangoli Tengah	20	18	Taliabu Selatan	1
9	Mangoli Timur	47	19	Taliabu timur selatan	41
10	Mangoli Utara Timur	35			

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sula Tahun 2012





Tabel 26. Sentra Produksi Industri Skala UMKM Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kabupaten Sula

No	Sentra Produksi	Kecamatan	Desa
1	Meubel	Sanana Utara	Malbufa, man-gega,
		Sanana	Mangon, Wai-Ipa, Umaloya, pastina,
		Sulabesi tengah	Waiboga, Waiman,
		Sulabesi Barat	Kabau Pantai, kabau Darat, Wai Ina, Sekom,
		Sulabesi Timur	Wailia, fatkauyon, Baleha
2	Aneka Roti	Sanana	Mangon, Fagudu, falahu, Fatce, Fogi, Waihama, pastina,
3	Halua Kanari	Sanana	Fogi, Wailau
4	Ikan Julung	Sulabesi tengah	Waiboga
5	Anyaman	Sulabesi tengah	Soamole, waiman, fat-Iba, Bega, Baleha,

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sula Tahun 2012

Berdasarkan data Tabel 26, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki 5 sentra produksi industri skala mikro kecil dan menengah yang secara keseluruhan saat ini berbasis pada pertanian. Sentra-sentra produksi tersebut adalah sentra produksi meubel di Kecamatan Sanana Utara, Sanana, Sulabesi Tengah, Sulabesi Barat, dan Sulabesi Timur, kemudian sentra produksi aneka roti dan sentra produksi halua kenari di wilayah Kecamatan Sanana, serta sentra produksi ikan julung dan sentra produksi anyaman di Kecamatan Sulabesi Tengah.

5.9. Potensi dan Sentra Produksi UMKM di Kabupaten Pulau Morotai

Pulau Morotai sebagai kabupaten muda di Provinsi Maluku Utara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 27,





Kabupaten Pulau Morotai memiliki 10 jenis usaha yang bergerak pada industri mikro kecil dan menengah di Tahun 2012. Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu misalnya tikar sangat besar keberadaannya di Kabupaten Pulau Morotai, dimana pada tahun 2012 terdapat 91 unit usaha. Kemudian diikuti oleh industri produk roti dan kue sebanyak 56 unit usaha.

Tabel 27. Jumlah Industri Mikro Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten Pulau Morotai

No	Kecamatan	2012
1	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	91
2	Industri produk roti dan kue	56
3	Industri furnitur dari kayu	37
4	Industri bata mortar dan semen tahan api	8
5	Industri barang logam lainnya	5
6	Industri air minum dan air mineral	2
7	Industri oven perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik	1
8	Industri barang dari semen	1
9	Industri kerajinan	1
10	Industri produk makanan lainnya	1
	Jumlah	203

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morotai Tahun 2012

Dengan pertumbuhan industri mikro kecil dan menengah yang besar di Kabupaten Pulau Morotai, tampak bahwa perkembangan terbesarnya terdapat pada Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur, sebagaimana terlihat pada Tabel 28 berikut.





Tabel 28. Kondisi Industri Kecil Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai

No	Kecamatan	Jumlah
1	Morotai selatan	49
2	Morotau Timur	57
3	Morotai Utara	59
4	Morotai Selatan Barat	26
5	Morotai jaya	14
	Jumlah	205

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morotai Tahun 2012

Tabel 29. Sentra Produksi Industri Skala UMKM Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pulau Morotai

No	Sentra produksi	Kecamatan	Desa
1	Kerajinan Besi Putih	Morotai Selatan	Daruba
2.	Kue dan Roti Gotalamo		Gotalamo
3	Kue dan Roti Muhajirin		Muhajirin
4	Tela Press Darame		Darame
5	Mebel Daeo		Daeo
6	Batu Nisan		Darame
7	Ikan Asin		Kolorae
8	Kerajinan oven Pandanga		Pandanga
9	Mebel Sangowo	Morotai Timur	Sangowo
10	Anyaman sangowo		Sangowo
11	Anyaman Mira		Mira





Lanjutan Tabel 29.

No	Sentra produksi	Kecamatan	Desa
12	Kue dan Roti Mira		Mira
13	Makanan Ringan		Mira
14	Anyaman Losuo	Morotai Utara	Losuo
15	Anyaman Sakita		Sakita
16	Kue dan Roti sakita		Sakita
17	Mebel Gorua		Gorua
18	Anyaman Gorua		Gorua
19	Kerajinan Kreatif		Gorua
20	Anyaman Kenari		Kenari
21	Kue dan Roti Wayabula	Morotai Selatan Barat	Wayabula
22	Mebel Wayabula		Wayabula
23	Mebel Loleo Jaya		Wayabula
24	Mebel Mira		Loleo Jaya
25	Roti dan Kue Gorua	Morotai Jaya	Loleo Jaya

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morotai Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 29, Kabupaten Pulau Morotai memiliki 25 sentra produksi industri mikro kecil dan menengah yang tersebar pada 5 wilayah kecamatan. Sentra produksi yang terbentuk antara lain sentra produksi Kerajinan Besi Putih, Kue dan Roti Gotalamo, Kue dan Roti Muhajirin, Tela Press Darame, Mebel Daeo, Batu Nisan, Ikan Asin, dan Kerajinan oven Pandanga di Kecamatan Morotai Selatan. Sentra Produksi Mebel Sangowo, Anyaman sangowo, Anyaman Mira, Kue dan Roti Mira, serta Makanan Ringan di Kecamatan Morotai Timur. Sentra produksi Anyaman





Losuo, Anyaman Sakita, Kue dan Roti sakita, Mebel Gorua, Anyaman Gorua, Kerajinan Kreatif, dan Anyaman Kenari di Kecamatan Morotai Utara. Sentra Produksi Kue dan Roti Wayabula, Mebel Wayabula, Mebel Loleo Jaya, dan Mebel Mira di Kecamatan Morotai Selatan Barat. Kemudian di Kecamatan Morotai Jaya adalah sentra produksi Roti dan Kue Gorua.





BAB VI

KONDISI DAN DAYA DUKUNG SUMBERDAYA DALAM PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI UMKM DI PROVINSI MALUKU UTARA

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki korelasi dengan beberapa komponen pendukung. Komponen tersebut adalah: (1) Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Ketersediaan energi listrik; (3) Ketersediaan Air Bersih; (5) Ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara serta (6) Keberadaan perbankan.

Mengkaji data-data ekonomi periode 2012 di sembilan kabupaten kota pada Provinsi Maluku Utara, memberikan gambaran ketersediaan komponen pendukung untuk bersinergi menciptakan UMKM yang andal dan sukses. Data ekonomi yang memberikan informasi tersebut, terdapat pada beberapa sumber seperti: Daerah Dalam Angka (DDA), Dokumen Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hasil analisis data akan menginformasikan kesiapan kabupaten/kota untuk menciptakan UMKM, optimalisasi komponen pendukung, dan optimalisasi kebijakan pemerintah dengan capaian realisasi.

6.1. Daya Dukung Sumber Daya Manusia

Karakteristik dari UMKM salah satunya adalah jumlah tenaga kerja yang berlimpah. Faktor yang membuat keadaan itu terjadi, karena manusia yang bekerja pada sektor ini memiliki strata pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan





pada strata Sekolah Dasar (SD) yang banyak mendominasi pekerja pada sektor ini, meskipun dalam analisis ini belum tersaji. Dari hasil analisis sampling di beberapa tempat usaha pada sembilan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menemukan rendahnya tingkat pendidikan dari pekerja pada bidang UMKM.

Sumberdaya manusia memiliki andil besar untuk kemajuan UMKM. SDM merupakan salah satu penilaian internal untuk melihat kelemahan (*weaknes*) dan kekuatan (*strength*) pada sebuah entitas bisnis. Pengelola UMKM yang memiliki pegetahuan dan pengalaman akan memberikan nilai tambah berupa pengembangan produk dan pengembangan usaha, mampu mengikuti perubahan dengan melakukan inovasi untuk beradaptasi di tengah persaingan usaha yang kompetitif. UMKM yang memiliki SDM seperti ini, berpeluang lebih besar untuk menjadi UMKM yang andal. Karena orientasinya tidak sekadar untuk memenuhi kehidupan ekonomi jangka pendek semata atau sebagai usaha sampingan. Melainkan menjadikan usaha tersebut sebagai aktivitas ekonomi jangka panjang. Usaha yang menghasilkan produk dengan teknik yang efisien dan efektif. Produk yang dihasilkannya berdaya saing, dapat memasuki wilayah pemasaran di daerah lain.

Karakteristik SDM pada UMKM secara umum adalah memiliki kuantitas yang sangat melimpah, namun belum sebanding dengan pemilikan kualitas. SDM yang berada di UMKM memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Karena pelaku usaha menggunakan pendekatan konvensional dan cenderung jangka pendek, maka perhatian terhadap SDM relatif belum maksimal. Melimpahnya SDM yang dimiliki UMKM membawa dampak pada *reward* berupa gaji atau upah yang diterima oleh tenaga kerja yang berada di UMKM masih rendah, belum memenuhi standar gaji yang berlaku sesuai ketetapan pemerintah





setempat. Hal ini membuat tingkat *employment turn over* relatif tinggi, yaitu karyawan masuk dan keluar dari sebuah usaha cukup tinggi.

Tabel 30. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota Berdasarkan Umur Produktif Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Bekerja			Belum Bekerja			Jumlah Angkatan kerja
		Laki-laki	Wanita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	
1	Halmahera Barat	27.906	16.784	44.690	412	647	1.059	45.749
2	Halmahera Tengah							
3	Kepulauan Sula)*	35.112	19.915	55.027	1.158	2.073	3.231	58.258
4	Halmahera Selatan)*	49.978	27.857	77.835	1.487	2.184	3.671	81.506
5	Halmahera Utara	55.971	53.370	109.341	47.447	27.848	75.295	184.636
6	Halmahera Timur	21.674	10.766	23.525	1.851	587	11.353	34.878
7	Pulau Morotai)*	19.702	2.379	22.081	1.040	180	1.220	23.301
8	Ternate)**	92.624	54.567	147.190	4.924	10.545	15.469	162.659
9	Tidore Kepulauan)*	24.438	14.396	38.834	957	1.293	1.944	2.250

Sumber: diolah melalui data DDA Kabupaten/Kota

)* Data DDA 2011, (**) Data DDA 2010

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah usia produktif (15-64) yang telah bekerja dan belum bekerja di sembilan (9) kabupaten/kota. Terutama pada usia produktif yang belum bekerja, kota Ternate memiliki jumlah yang paling terbanyak yaitu sebesar 15.469. Jumlah tersebut merupakan data periode 2010, artinya besaran yang disebutkan pasti bertambah. Kabupaten Halmahera Utara pada





urutan ke dua sebesar 75.295 (data 2012), sedangkan kabupaten Halmahera Timur pada pada urutan ke tiga sebesar 11.353 (data 2012). Pulau Morotai yang paling rendah tingkat usia produktif yang belum bekerja yaitu sebesar 1.220 (data 2011), disusul kemudian Tidore Kepulauan sebesar 1.944 (data 2011).

Besaran jumlah usia produktif yang belum bekerja memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Artinya, usia produktif yang belum bekerja dapat memberikan keuntungan ekonomi. Mereka akan memberikan keunggulan bila pemerintah provinsi/kabupaten/kota memiliki data terpadu berkaitan dengan potensi UMKM. Dengan data itu pemerintah daerah dapat menyusun program induk kewirausahaan yang bersifat komprehensif. Antarsatuan kerja pemerintah sangat penting berpartisipasi menyusun program tersebut. Program itu yang menjadi dasar satuan kerja untuk membuat program pengembangan UMKM. Satuan kerja terkait melakukan pelatihan UMKM, sedangkan satuan kerja lain menyediakan alat produksi berdasarkan kebutuhan UMKM. Yang lainnya juga mendukung pembangunan infrastruktur. Pengaruh yang positif tadi dapat menjadikan usia produktif yang tadi belum bekerja dapat terserap pada UMKM. Pelatihan yang terencana dan komprehensif akan menciptakan sumber daya manusia andal dan unggul pada UMKM. Keadaan sebaliknya, dapat menjadi kelemahan bilamana pemerintah daerah belum memiliki program induk kewirausahaan dan potensi UMKM. Ketiadaan data tadi menyulitkan satuan kerja pemerintah daerah untuk menetapkan langkah prioritas dan fokus kerja.





6.2. Daya Dukung Kapasitas Energi Listrik

Pada konteks penilaian kemampuan usaha, komponen pendukung seperti energi listrik termasuk kategori penilaian eksternal. Penilaian ini berkaitan dengan kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threat*). Kesempatan karena dukungan eksternal dapat memberikan kontribusi positif bagi sumber daya bisnis UMKM. Sedangkan ancaman merupakan dampak sebaliknya, dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan UMKM. Ketersediaan energi listrik di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah bagian dari kemampuan pemerintahan untuk merencanakan dan merealisasikannya. Karena itu, UMKM hanya mampu menyampaikan kepada pemerintah masalah ketidakterediaan listrik di daerahnya yang membawa dampak terhadap penurunan produktivitas. Pemerintah bersama instansi terkait menyusun rencana strategi seperti yang tercantum dalam dokumen Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sejauh mana kinerja pemerintah mengimplementasikan rancangan tersebut dapat dinilai pada dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk melihat kinerja pemerintah, maka tolok ukur yang digunakan salah satunya adalah dokumen Daerah Dalam Angka (DDA).

Energi listrik mempunyai dukungan penting dalam keberhasilan UMKM. Energi sebagai pembangkit alat-alat produksi untuk mengelola produk (barang dan jasa) hingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Ketersediaan energi akan menciptakan optimalisasi kinerja UMKM, menghasilkan produk yang lebih murah, tepat waktu, dan daya saing sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana kapasitas produksi. Tabel 1.2 menjelaskan kemampuan energi listrik untuk memberikan dukungan kepada UMKM.





Tabel 31. Ketersediaan Energi Listrik di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Energi Terbangkitkan (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Didistribusikan (KWh)	Daya Terpasang (KWh)	Daya Mampu (KWh)
1	Halmahera Barat	1.400.272	31.791	1.368.481	6.375	3.565
2	Halmahera Tengah	734.816	1.696	733.120	3.530	2.540
3	Kepulauan Sula	1.107.571	17.876	1.089.695	9.685	4.446
4	Halmahera Selatan	1.619.450	5.449	1.614.001	8.108	4.952
5	Halmahera Utara	2.219.731	47.474	2.172.257	9.336	7.100
6	Halmahera Timur	519.470	6.306	513.164	4.170	2.496
7	Pulau Morotai	430.240	8.603	421.637	2.970	1.700
8	Ternate	9.867.768	150.238	9.717.530	33.061	20.250
9	Tidore Kepulauan	2.395.367	68.760	2.326.607	13.962	7.430

Sumber: diolah melalui data DDA Kabupaten/Kota

Data pada Tabel 31 menunjukkan bahwa ketersediaan listrik di sembilan kabupaten/Kota cukup memadai untuk mendukung keberadaan UMKM. Meskipun di beberapa desa/kecamatan masih belum merata ketersediaan energi listrik, namun sebagian besar dari desa/kecamatan telah menikmatinya. Kondisi tersebut menjelaskan kemajuan ekonomi simetris dengan penggunaan energi listrik. Semakin maju suatu daerah, maka semakin besar ketersediaan energi terbangkitkan. Korelasi signifikan antara kemajuan ekonomi dan ketersediaan listrik merupakan sintesa bahwa semakin bertumbuh dan berkembangnya UMKM





di kabupaten/kota, maka semakin besar pula persediaan energi listrik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Tampak terlihat kota Ternate memiliki daya mampu yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 20.250 kilowatt jam (KWh). Jumlah tertinggi ini memiliki alasan sesuai sintesa di atas. Kota Ternate selain jumlah penduduk terbanyak kemajuan ekonominya sangat dinamis membuat pemenuhan terhadap energi listrik semakin besar. Berikutnya, kota Tidore Kepulauan sebanyak 7.430 KWh, selanjutnya diikuti kabupaten Halmahera Utara sebanyak 7.100.

Persediaan energi listrik nasional secara keseluruhan mengalami penurunan, karena pembangunan pembangkit listrik masih terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas dan perkembangan ekonomi yang semakin maju. Demikian pula yang terjadi di kabupaten/kota provinsi Maluku Utara. Salah satu masalahnya adalah sumber energi listrik menggunakan mesin diesel yang sangat bergantung pada bahan bakar solar. Karena itu, pemerintah daerah memerlukan alternatif sumber energi listrik lain yang lebih efisien, misalnya pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) berupa matahari yang telah mulai dimanfaatkan di beberapa kabupaten Maluku Utara.

6.3. Daya Dukung Kapasitas Air Bersih

Faktor pendukung lainnya yang penting dalam pengembangan UMKM adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 907/Menkes/SK/VII/2002 mensyaratkan standar air bersih dan pengawasan kualitas air minum. Tujuan peraturan ini adalah menetapkan standar kualitas air





untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin besar kebutuhan konsumsi air bersih. Demikian juga dengan peningkatan ekonomi daerah membawa pengaruh terhadap peningkatan konsumsi air. Untuk memenuhi ketersediaan air bersih, selain menggunakan sarana non-perpipaan (misal, sumur atau pompa yang dibuat masyarakat) juga memerlukan sarana perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sarana pertama (non-perpipaan) cukup terbatas, mengingat tidak semua daerah dapat memenuhi air bersih dengan cara tersebut, selain struktur tanah yang sulit juga tempat pemukiman yang tidak layak untuk menggunakan sarana tersebut. Umumnya di wilayah provinsi Maluku Utara menggunakan sarana kedua (perpipaan).

Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Bagi manusia air bersih menjadi kebutuhan utama. Begitu pun dengan UMKM, bukan saja jumlah ketersediaan air, tetapi ketersediaan air yang berkualitas. Faktor pendukung ini termasuk dalam kategori penilaian eksternal. Sebab UMKM tidak mampu menyediakan atau memilikinya. *Cost* untuk menyediakan sangat besar, karena itu membutuhkan perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan dan meningkatkan pemenuhan air bersih. Dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah kuantitas dan kualitas air bersih. Perhatian kuantitas air yaitu dengan merencanakan sumber air melalui sumur dan sungai dengan sistem gravitasi atau pompa, mengairi melalui pemasangan pipa, perluasan jangkauan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memiliki program pemeliharaan sumber air. Sedangkan perhatian pada kualitas air yaitu, pemerintah daerah harus memiliki standar kualitas baku air dan kriteria





perencanaan penyediaan air bersih. Dengan perhatian dan implementasi yang maksimal, maka akan memberikan dukungan positif bagi UMKM.

Tabel 32. Penyediaan Kapasitas Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Per. 2011

No	Kabupaten/Kota	Distribusi Air	
		Pelanggan	Volume (M ³)
1	Halmahera Barat	3.756	657.097
2	Halmahera Tengah	525	64.625
3	Kepulauan Sula	2.423	272.748
4	Halmahera Selatan	3.011	1.019.160
5	Halmahera Utara	4.439	907.773
6	Halmahera Timur	NA	NA
7	Pulau Morotai	NA	NA
8	Ternate	18.916	10.420.361
9	Tidore Kepulauan	2.435	423.112

Sumber: diolah melalui data DDA Kabupaten/Kota NA=No Aplicable (Data tidak tersedia)

Tabel 32 di atas menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi membawa dampak pada peningkatan konsumsi air bersih. Selain air bersih digunakan untuk kebutuhan individu, juga dimanfaatkan UMKM untuk mendukung peningkatan produksi. Semua jenis bisnis UMKM pasti membutuhkan air bersih, meskipun dalam mengonsumsi air bersih terdapat kapasitas yang berbeda-beda. Tampak





terlihat, kota Ternate membutuhkan konsumsi air bersih terbanyak yaitu sebesar 10.420.361 m³. Selain karena jumlah penduduk terbanyak, kota Ternate memiliki banyak UMKM akibatnya kebutuhan air bersih sangat besar. Halmahera Selatan memiliki kebutuhan air bersih juga yang tinggi yaitu sebesar 1.019.160 m³. Kebutuhan air yang besar karena Halmahera selatan termasuk jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Ternate. Pada posisi selanjutnya, adalah Halmahera Utara sebesar 907.773 m³. Kabupaten ini selain perkembangan penduduk yang cepat juga memiliki banyak UMKM.

Ekonomi daerah yang semakin meningkat dan laju pertumbuhan penduduk yang besar membawa implikasi terhadap penyediaan air bersih. Individu dan UMKM mengharapkan PDAM memiliki kinerja baik. Adapun kriteria kinerja baik, PDAM harus mampu mendistribusikan air bersih setiap saat dan memiliki standar mutu berdasarkan peraturan Kemenkes. Karena itu, air bersih bukan hanya kuantitas, menghubungkan pipa untuk mentransmisikan air ke daerah-daerah lainya, melainkan memerlukan standar kualitas air dan pengawasan terhadap kepatuhan standar tersebut. Berkaitan dengan hal itu, maka PDAM perlu merumuskan langkah strategi untuk meningkatkan kinerja. Langkah tersebut, *pertama*, melestarikan sumber air bersih. *Kedua*, mencari sumber air potensial. *Ketiga*, melakukan pemeliharaan secara berkala pada mesin pompa dan pipa transmisi. *Keempat*, perluasan jaringan pipa untuk mentransmisikan air bersih pada daerah yang membutuhkan. *Kelima*, meningkatkan kerja sama dengan dinas terkait seperti Kimpraswil untuk mengembangkan sumber air bersih dan dinas kesehatan untuk secara intens memantau kualitas air.





6.4. Daya Dukung Ketersediaan Transportasi Darat, Udara, dan Laut

Transportasi merupakan variabel eksternal mendukung keberhasilan UMKM. Perpindahan manusia dan barang pada suatu daerah ke daerah lain membutuhkan sarana transportasi. Geografis kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara mempunyai keunikan dengan daerah lain karena terpisah. Masing-masing kabupaten/kota terdiri dari pulau-pulau. Untuk menempuh kabupaten/kota lain membutuhkan transportasi darat, laut, dan udara. Membahas transportasi harus menjelaskan dua komponen penting. *Pertama*, moda transportasi dan *kedua*, lalu-lintas transportasi. Komponen pertama akan tersedia, bilamana komponen kedua telah tersedia. Umumnya, komponen kedua menjadi perhatian dan pekerjaan pemerintah daerah. Karena itu tiga tabel (33, 34, dan 35) di bawah, menjelaskan perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas jalan raya, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara, untuk mendukung perkembangan UMKM di provinsi Maluku Utara.





Tabel 33. Fasilitas Jalan Raya, Panjang, dan Kondisi Permukaan Kabupaten/Kota Per. 2012

No	Kabupaten/Kota	Panjang (Km)	Kondisi Permukaan (Km)				Belum Tembus (Km)
			Aspal	Kerikil	Aspal Curah	Tanah	
1	Halmahera Barat)*	733,47	214,61	28,70	134,86	355,30	
2	Halmahera Tengah)*	95	5	78.50	11.50	0	
3	Kepulauan Sula)*	778,02	161,52	366	0	13	237,50
4	Halmahera Selatan)*	1.068,30	58,1	152,2	693	165	
5	Halmahera Utara	610,19	99,18	174,05	167,23	169,73	
6	Halmahera Timur	821.03	218.12	324.49	66	212.42	
7	Pulau Morotai)**	NA	NA	NA	NA	NA	
8	Ternate)**	289.744	245.556	0	0	44.188	
9	Tidore Kepulauan)*	427.191,8 8	325.645,60	43.910	0	57.636,31	

Sumber: diolah melalui data DDA Kabupaten/Kota

Ket:)* Data per. 2011)** Data per. 2010 NA=No Aplicable (Data tidak tersedia)

Tabel 33 memperlihatkan perhatian pemerintah daerah untuk membuka akses jalan darat melalui jalan raya antardesa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Tabel itu memperlihatkan juga akses kabupaten tadi dengan kabupaten lainnya yang dapat dijangkau dengan transportasi darat. Misalnya, dengan menggunakan transportasi darat bisa menjangkau kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, sebagian Tidore Kepulauan, dan sebagian





Halmahera Selatan. Panjang jalan (Km) yang telah berhasil dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terlihat dalam tabel di atas. Tidore Kepulauan memiliki jalan terpanjang mencapai 427.191,88 Km, dengan kondisi permukaan jalan yang diaspal 325.645,60 Km atau sebanyak 76% kondisi jalan telah diaspal, sedangkan sisanya 24% kondisi permukaan masih kerikil, aspal lapen, dan tanah. Kota Ternate memiliki panjang jalan 289.744 Km, jumlah panjang jalan yang telah diaspal 245.556 atau telah mencapai 85%, jumlah sebesar 15% masih menggunakan tanah. Selanjutnya, Halmahera Selatan memiliki panjang jalan 1.068,30 Km. Kondisi jalan yang diaspal mencapai 58,1 Km atau baru mencapai 5%. Sisanya sebanyak 95% kondisi jalan menggunakan kerikil, aspal lapen, dan tanah. Tabel di atas menginformasikan di Kabupaten Sula masih terdapat jalan yang belum terakses yaitu sepanjang 237,50 Km. Keadaan ini akan menyulitkan UMKM untuk berkembang. UMKM akan memerlukan biaya yang lebih besar saat memasok bahan baku dari luar dan menjual produk jadi ke luar daerah tersebut. Dalam penentuan harga pokok penjualan produk akan tinggi yang akan berimbas pada tingginya harga jual produk. Data panjang jalan di Pulau Morotai belum tersedia di Daerah Dalam Angka (DDA) per 2010 belum tersedia sehingga tidak disertakan dalam analisis.

Setelah melihat perkembangan ketersediaan lalu-lintas transportasi darat, kondisi jalan belum semuanya menggunakan aspal dan masih ada daerah yang belum memiliki akses jalan dari desa/kecamatan ke ibu kota kabupaten. Fenomena ini membuat pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Maluku Utara masih perlu bekerja keras terutama pada dinas Kimpraswil dan dinas terkait lainnya untuk bekerja sama meningkatkan aksesibilitas. Upaya membuka terisolasinya beberapa





desa atau kecamatan yang merupakan manifestasi dari kesetaraan pembangunan. Penjelasan selanjutnya, tentang arus penumpang dan barang yang menggunakan transportasi laut. Potret aktivitas tersebut, tergambar di pelabuhan laut.

Tabel 34. Aktivitas Pelabuhan Laut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan Laut					
		Jumlah Kapal	Penumpang		Barang (Ton)		
			Berangkat	Datang	Muat	Bongkar	Ekspor
1	Halmahera Barat)*	971	61.299	62.136	11.460	18.667	0
2	Halmahera Tengah)*	NA	NA	NA	NA	NA	0
3	Kepulauan Sula	1.773	32.160	31.594	7.143	27.029	0
4	Halmahera Selatan)*	NA	59.975	68.582	70.338	36.243	0
5	Halmahera Utara)*	3.318	57.224	65.116	74.179	102.810	0
6	Halmahera Timur	NA	2.151	2.534	287.160	6.959	6.036.621
7	Pulau Morotai	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Ternate)**	NA	379.462	386.821	19.984	417.782	0
9	Tidore Kepulauan)*	1.960	25.298	30.504	9.503	16.706	0

Sumber: diolah melalui data DDA Kabupaten/Kota

Ket:)* Data per. 2011)** Data per. 2010 NA=No Aplicable (Data tidak tersedia)

Pelabuhan laut merupakan tempat tambat lalu-lintas penumpang dan barang yang menggunakan moda transportasi kapal, motor laut, perahu, dan feri. Pelabuhan menjadi penting untuk mempermudah UMKM menyuplai bahan baku dari dalam dan luar daerah. Begitu pun sebaliknya mempermudah UMKM menjual produk di dalam dan di luar daerah. Pelabuhan laut juga menjadi tempat strategi,





selain sebagai alternatif juga menjadi solusi untuk memasarkan produk. Sebagai solusi, karena hampir sebagian besar wilayah Maluku Utara untuk menjangkaunya harus menggunakan moda transportasi laut.

Tabel 34 menunjukkan tingkat aktivitas di pelabuhan laut kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Data per. 2010 menyebutkan Kota Ternate yang paling tinggi aktivitas, bila menggunakan ukuran penumpang. Tercatat penumpang yang berangkat 379.462 orang dan datang sebanyak 386.821 orang. Halmahera Barat mencapai 61.299 orang yang berangkat dan yang datang sebanyak 62.136 orang. Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Selatan jumlah penumpang berangkat 59.975 orang dan yang datang sebanyak 68.582 orang. Kalau menggunakan ukuran barang untuk menganalisis aktivitas muat dan bongkar, tercatat kabupaten Halmahera Timur yang tertinggi, yaitu sebanyak 287.160 ton. Tingginya aktivitas muat dibandingkan dengan daerah lain, karena daerah ini memiliki potensi kekayaan tambang yang relatif besar membuat para investor pertambangan membangun perusahaannya. Indikasi ini juga terlihat dari data ekspor sebesar 6.036.621 ton. Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Utara tercatat aktivitas muat sebesar 74.179 ton dan bongkar 102.810 ton. Setelah itu, Halmahera selatan yang mencatat aktivitas muat sebesar 70.338 ton dan bongkar 36.243 ton. Sedangkan, data aktivitas bongkar menunjukkan Kota Ternate yang terbanyak sebesar 417.782 ton. Ini artinya, Kota Ternate menjadi pintu masuk strategi dalam perdagangan antardaerah dan provinsi.

Tabel 34 di atas, sekaligus memperlihatkan aksesibilitas antardaerah dengan menggunakan moda transportasi laut. Untuk itu UMKM dapat mempertimbangkan menggunakan transportasi laut sebagai alternatif setelah menganalisis semua aspek





yang berkaitan dengan penentuan harga jual dan risiko. Bilamana jalan darat tidak dapat menghubungkan antarkecamatan dan kabupaten/kota, maka transportasi laut menjadi solusi bagi UMKM. Dengan aktivitas yang meningkat pemerintah daerah harus mempersiapkan pelabuhan yang representatif untuk mendukung perkembangan ekonomi.

Selain pelabuhan laut sebagai komponen penting mendukung keberhasilan perkembangan UMKM. Komponen lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan pelabuhan udara. UMKM yang bergerak di bidang budi daya ikan hias, ikan karapu, dan lobster membutuhkan moda transportasi udara. Selain itu juga, untuk permintaan produk yang mendesak, UMKM memerlukan transportasi ini untuk mengantar (*delivery*) produk ke konsumen. Namun, biaya yang dikeluarkan relatif besar jika dibandingkan dengan kedua transportasi di atas. Berikut penjelasan mengenai aktivitas pelabuhan udara.



**Tabel 35. Aktivitas Pelabuhan Udara Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bandara	Jumlah Pesawat		Penumpang		Bagasi (Kg)	
			Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Muat	Bongkar
1	Halmahera Barat)*	0	0	0	0	0	0	0
2	Halmahera Tengah)*	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Kepulauan Sula	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Halmahera Selatan)*	1	209	209	2.972	2.594	17.670	17.126
5	Halmahera Utara)*	2	291	291	7.531	7.095	59.559	58.028
6	Halmahera Timur	1	527	527	20.964	17.503	140.372	87.569
7	Pulau Morotai	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Ternate)**	1	4.544	4.544	266.132	215.543	1.878.606	2.170.634
9	Tidore Kepulauan)*	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: diolah melalui data DDA Kabupaten/Kota

Ket:)* Data per. 2011)** Data per. 2010 NA=No applicable (Data tidak tersedia)

Pada Tabel 35 memperlihatkan aktivitas pelabuhan udara di provinsi Maluku Utara relatif cukup tinggi. Gambaran ini terlihat dari jumlah bandar udara sebanyak delapan (8) yang tersebar di kabupaten/kota. Kabupaten yang memiliki dua bandar udara adalah Halmahera Utara. Data mencatat bahwa Kota Ternate yang paling tertinggi aktivitas bandar udaranya. Tercatat pesawat yang berangkat dalam tahun 2010 sebanyak 4.544. Jumlah penumpang yang berangkat berjumlah 266.132 dan yang datang 215.543. Jumlah bagasi untuk aktivitas muat berjumlah





1.878.606 Kg dan untuk bongkar barang berjumlah 2.170.634 kg. Data ini memperlihatkan, bandar udara Babullah Ternate merupakan pintu utama bandar udara provinsi Maluku Utara. Bandara ini menjadi penghubung penerbangan dengan daerah dan provinsi lain.

Kabupaten Halmahera Timur termasuk Bandar udara yang juga ramai. Data menunjukkan jumlah pesawat yang berangkat melalui bandara tersebut sebanyak 527. Penumpang yang berangkat sebanyak 20.964 yang datang sebanyak 17.503. Untuk aktivitas bagasinya, jumlah barang yang dimuat sebanyak 140.372 kg dan aktivitas bongkar 87.569 kg. Meskipun, Halmahera Utara memiliki dua bandara, tetapi aktivitasnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan dua Bandar udara sebelumnya. Tercatat pesawat yang berangkat melalui kedua Bandar itu berjumlah 291, sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 7.531 orang dan penumpang yang datang berjumlah 7.095 orang. Bagasi untuk aktivitas muat berjumlah 59.559 Kg dan aktivitas bongkar berjumlah 58.028 Kg. Terdapat tiga bandar udara yang tidak tersedia datanya yaitu di kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai sehingga analisis tidak dapat dilakukan (*no applicable*).

Moda transportasi udara akan semakin berkembang kalau aktivitas ekonomi suatu daerah mengalami pertumbuhan yang baik. Khususnya, UMKM yang bergerak perikanan, perdagangan, dan bidang lain yang membutuhkan transportasi cepat akan memilih pesawat untuk menyuplai bahan baku dan mengantarkan produk. Karena itu, pemerintah daerah harus menjalin kerja sama dengan pihak maskapai penerbangan untuk membuka rute penerbangan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pembangunan fasilitas Bandar udara yang representative dan melakukan pemeliharaan.





Dalam konteks UMKM ketersediaan transportasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemajuan bisnis. UMKM yang menghasilkan barang/jasa dapat memperhitungkan waktu dan ongkos produksi secara efisien saat mengolah (menyiapkan) barang/jasa kepada konsumen. Begitu juga, dengan UMKM mampu memenuhi pelayanan yaitu menyediakan (*delivery*) barang/jasa kepada konsumen secara tepat waktu. Masa tunggu produksi karena keterlambatan bahan baku akibat dari masalah jalur transportasi dapat dieliminir. Masalah yang sama dapat terjadi, saat produk telah selesai diproduksi membutuhkan waktu yang relatif lama, akibat dari belum tersedianya jalur transportasi laut yang memadai sehingga memerlukan beberapa tempat (daerah) untuk tambat (singgah di pelabuhan). Masalah pada transportasi darat dapat diidentifikasi, misalnya kualitas jalan yang belum memadai karena masih bertanah. Kualitas jalan umumnya masih menggunakan aspal lapen (sejenis aspal curah). Aspal sejenis ini berkualitas rendah, karena saat kendaraan berkapasitas besar sering melewati dan hujan deras tiba, dapat mengakibatkan lubang-lubang besar di badan jalan. Kondisi ini dapat berimplikasi pada keselamatan pengguna jalan, keterlambatan produksi, dan keterlambatan memenuhi pesanan kepada konsumen. Akhirnya mengancam keberlangsungan hidup UMKM.

6.5. Daya Dukung Perbankan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, berfungsi menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi lainya adalah menyediakan jasa transaksi pembayaran baik tunai dan non-tunai. Beberapa jasa lainnya yang disediakan bank untuk mempermudah dan





memberikan keamanan kepada masyarakat. Dari pengertian itu, dapat dinyatakan bahwa indikasi kemajuan ekonomi dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank di suatu daerah. Semakin besar transaksi ekonomi akan memberikan efek kepada arus uang (lalu-lintas uang), maka industri perbankan akan memilih daerah yang transaksi ekonominya besar, dengan menempatkan cabang atau membuka bank (BPR atau BPRS). Kontribusi signifikan besarnya transaksi ekonomi adalah berasal dari UMKM. Meskipun demikian, masalah klasik UMKM masih seputar ketidakcukupan modal usaha. Untuk itu dengan keberadaan bank di provinsi Maluku Utara akan membantu kesulitan permodalan yang dialami UMKM. Tabel di bawah menggambarkan jumlah bank di provinsi Maluku Utara.

Tabel 36. Jumlah Bank di Provinsi Maluku Utara

No	Bank	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu
1	Bank Nasional Indonesia	0	1	3
2	Bank Mandiri	0	1	2
3	Bank Rakyat Indonesia	0	2	3
4	Bank Tabungan Negara	0	1	0
5	Bank Pembangunan Daerah Maluku	0	5	3
6	Bank Danamon Indonesia	0	1	0
7	Bank Artha Graha	0	1	0
8	Bank Muamalat	0	1	1
9	Bank Mega	0	1	1
10	Bank Centra Asia	0	0	1





Lanjutan tabel 36.

No	Bank	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu
11	Bank Syariah Mandiri	0	1	1
12	Bank Sinar Mas	0	1	0
13	Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN)	0	1	3
14	BPR Malifut Danatama	1	0	0
15	BPR Bobato Lestari	1	1	0
16	BPRS Bahari Berkesan	1	0	0
	Jumlah	4	18	18

Sumber: diolah melalui data DDA Provinsi Maluku Utara Per 2012

Berdasarkan data pada Tabel 36 terlihat bahwa jumlah bank di provinsi Maluku Utara berjumlah 40. Di dalamnya 4 kantor pusat berklasifikasi BPR dan BPRS, kemudian kantor cabang berjumlah 18 dan 18 berklasifikasi kantor cabang pembantu (kantor kas). Bank-bank yang disebutkan di atas memiliki kantor pusat (BPR dan BPRS) dan cabang berkedudukan di Kota Ternate.

Bank yang beroperasi di provinsi Maluku Utara berjumlah 40 belum termasuk satu (1) bank perwakilan bank sentral (BI) mengindikasikan perkembangan ekonominya relatif sangat berkembang. Keberadaan bank sangat memberikan pengaruh kepada UMKM. Khususnya berkaitan dengan kredit/pembiayaan. Calon *ernterpreneurship* yang akan membangun usahanya membutuhkan modal, dan setelah beroperasi ia juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Karena itu, UMKM harus memahami dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan bank. Bank yang profesional tentunya memiliki prinsip *prudential* untuk mencegah terjadinya gagal bayar (*default*) oleh





para nasabah termasuk UMKM. Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui bank nasional (BUMN), tetapi persyaratan kredit/pembiayaan menjadi rujukan. Kendala bagi UMKM untuk mengurus kredit/pembiayaan adalah: (1) memiliki transaksi lebih dari enam (6) bulan yang ditunjukkan dengan catatan pembukuannya atau memiliki catatan berupa transaksi di buku tabungan, (2) tidak memiliki jaminan (*collateral*) yang memadai, dan (3) pengetahuan terhadap pemenuhan syarat pengajuan modal masih rendah.

Kendala di atas memerlukan kajian komprehensif dan membutuhkan kerja sama lintas satuan kerja daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut dengan: (1) satuan kerja yang berkaitan dengan kemandirian UMKM memiliki data perkembangan bisnis yang andal, (2) memonitor para UMKM yang berpotensi memiliki perkembangan bisnis yang positif, (3) membantu UMKM untuk memiliki sertifikat yang murah, sebagai agunan, (4) membina UMKM untuk meningkatkan kompetensi sesuai jenis usaha, (5) membina UMKM untuk mengetahui pembukuan secara sederhana, (6) merumuskan dan mengkaji secara bersama antarsatuan kerja, terkait program pembinaan dan program bantuan modal, dan (7) satuan kerja membangun kerja sama dengan pihak bank untuk mengedukasi UMKM, agar memahami proses pengajuan kredit/pembiayaan.

Tabel 37 berikut akan menjelaskan *performance* bank menjalankan fungsinya. Dua fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan mendistribusikan dana melalui kredit/pembiayaan kepada masyarakat termasuk UMKM di provinsi Maluku Utara. Data yang disajikan dalam bentuk kuartalan (tiga bulan) yang disimbolkan dengan K.1, K2, K3, dan K4.



**Tabel 37. Kinerja Bank Umum di Provinsi Maluku Utara Per. 2012**

Kinerja Bank Umum	Periode 2012 (dalam miliar)			
	K.1	K.2	K.3	K.4
Total aset	5.072,35	5.087,49	5.477,92	5.791,38
DPK	4.313,00	4.352,70	4.461,72	4.424,58
Tabungan	2.021,02	2.222,78	2.351,96	2.737,29
Giro	1.521,24	1.294,04	1.323,81	865,03
Deposito	770,74	751,45	785,95	822,26
Kredit	3.299,83	3.380,16	3.708,30	3.864,23
▪ Modal kerja	1.119,04	1.347,64	1.164,32	1.169,31
▪ Investasi	300,28	329,83	347,51	360,13
▪ Konsumsi	1.880,50	1.702,69	2.196,47	2.334,80
Loan Deposit Ratio (%)	76,51%	81,61%	83,11%	87,34%
Kredit UMKM				
Kredit mikro	254,10	405,79	222,32	224,39
▪ Modal kerja	214,80	363,65	175,05	180,25
▪ Investasi	39,33	42,15	47,27	44,14
▪ Konsumsi	0	0	0	0
Kredit kecil	779,00	810,30	761,40	805,70
▪ Modal kerja	589,35	614,76	575,70	613,33
▪ Investasi	181,59	195,40	185,70	192,37
▪ Konsumsi	8,05	0,14	-	-
Kredit menengah	242,60	299,90	273,13	260,39
▪ Modal kerja	204,20	242,16	217,98	191,21
▪ Investasi	38,37	57,73	55,15	69,18
▪ Konsumsi	0	0	0	0
Total Kredit MKM	1.275,70	1.515,99	1.256,85	1.290,48
NPL bruto MKM (%)	3,42%	3,32%	4,13%	3,78%

Sumber: Kajian Ekonomi Triwulan Bank Indonesia Per 2012





Tabel 37 menggambarkan perkembangan kinerja perbankan pemerintah dan swasta. Data aset K.4 tercatat sebesar Rp5,79 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2011, pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan aset sebesar 20,6%¹. Dalam data yang sama, menjelaskan pertumbuhan aset bank swasta periode 2012 sebesar 33,8%. Sedangkan pertumbuhan aset bank pemerintah sebesar 18,5%. Bagian aset bank swasta terjadi kenaikan dari 14,1% pada K.4 2011 tumbuh menjadi 15,6% pada K.4 2012.

Kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menurut tabel di atas, menunjukkan pada K.4 mencapai Rp4,42 triliun, naik 15,5% dibandingkan tahun 2011. Komposisi simpanan menunjukkan, produk tabungan mendominasi yaitu sebesar 61,9%, kemudian giro sebesar 18,6% dan deposito 19,6%.

Berikut kinerja kredit/pembiayaan, menurut tabel di atas jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp3,86%, meningkat 23,4% jika dibandingkan tahun 2011². Data triwulan (K1, K2, K3, dan K4) menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 4,2% pada kuartal sebelumnya. Komposisi kredit/pembiayaan dilihat dari penggunaannya. Kredit konsumsi yang paling besar jumlahnya, yaitu 60,4%. Kedua, penggunaan untuk modal kerja 30,3%, yang terakhir digunakan untuk investasi sebesar 9,3%. Pertumbuhan kredit/pembiayaan jika dibandingkan dengan periode 2011, penggunaan untuk konsumsi yang paling tertinggi, yaitu sebesar 29,9%, kemudian investasi sebesar 26,5% dan modal kerja sebesar 11,3%.

¹ Bank Indonesia Ternate dalam Kajian Ekonomi Triwulan Bank Indonesia Periode 2011

² Bank Indonesia Ternate, *Ibid*





Kajian utama dalam pembahasan ini, dapat dilihat pada golongan kredit/pembiayaan. Total kredit/pembiayaan UMKM pada kuartal laporan (K.4) mencapai Rp1,29 triliun atau sebesar 33,4% dari total kredit/pembiayaan yang diberikan. Melihat perkembangannya, pertumbuhan kredit/pembiayaan untuk UMKM tumbuh menjadi 9,1%. Pertumbuhan ini, terjadi karena kontribusi golongan kredit/pembiayaan menengah yaitu sebesar 20,2% dari total kredit/pembiayaan UMKM. Program pemerintah untuk membantu UMKM melalui program pembiayaan usaha kecil (KUR) selama periode 2012 (K.4) mencapai 2,57 triliun, meningkat 32% jika dibandingkan pada periode 2011³. Data kuartal menggambarkan KUR mengalami kenaikan sebesar 5%, jika dibandingkan kuartal pada periode 2011.

Meningkatnya kredit/pembiayaan UMKM yang dilakukan bank umum, menunjukkan bahwa UMKM di Maluku Utara mengalami kemajuan. Kemajuan dalam perkembangan usaha UMKM, peluang UMKM untuk menciptakan produk (barang/jasa), UMKM semakin *bankable*, dan adanya dukungan pemerintah terutama perbankan nasional untuk mengembangkan UMKM. Karena itu, pemerintah daerah masih memerlukan model kerja sama antarsatuan kerja yang lebih terintegrasi. Antarsatuan kerja merumuskan secara bersama tentang program terpadu pengembangan UMKM. Dari program induk, masing-masing satuan kerja menyusun program strategis berdasarkan fungsinya. Di dalamnya terdapat langkah dan capainnya. Dengan terintegrasinya program satuan kerja, maka kajian untuk

³ Bank Indonesia Ternate dalam Kajian Ekonomi Triwulan Bank Indonesia Periode 2012





menganalisa persoalan UMKM akan lebih komprehensif yang melibatkan berbagai pertimbangan dan alternatif yang lebih optimal.

Fungsi penting perbankan kepada UMKM adalah memberikan kredit/pembiayaan. Kendala umum yang dihadapi oleh UMKM adalah faktor modal. Modal menjadi salah satu faktor utama untuk membangun dan memelihara kelangsungan sebuah entitas (*going concern*). Kalau diperhatikan ada koneksitas kepentingan antarkedua usaha. Kepentingan bank untuk memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat (termasuk UMKM) dan pihak UMKM memiliki kepentingan untuk meningkatkan dan memelihara keberlangsungan usaha. Namun, kedua kepentingan tersebut sering kali belum bersinergi. Misalnya, bank mensyaratkan penerima Kredit Usaha Kecil (KUR) mikro adalah usaha yang berlangsung sudah lebih dari enam (6) bulan yang ditunjukkan dengan aktivitas usaha melalui catatan akuntansi atau buku tabungan (*passbook*) dan memiliki agunan (syarat agunan jika bank menilai perlu). Syarat demikian, bagi usaha mikro cukup sulit untuk memenuhinya, karena beberapa alasan: (1) umumnya jenis usaha mikro belum memiliki pencatatan akuntansi yang memadai karena keterbatasan pengetahuan, (2) usaha mikro umumnya adalah jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Uang yang mereka terima dari penjualan produk digunakan untuk menopang kebutuhan ekonomi. Kalau ada kelebihan dari penjualan tadi, biasanya disimpan di rumah, dan (3) objek yang dijadikan sebagai agunan tidak tersedia. Contoh, rumah yang ditempati belum memiliki sertifikat atau tempat usaha bersifat tidak tetap. Kendala-kendala yang disebutkan itu, merupakan masalah yang sering terjadi. Meskipun ada beberapa masalah lain seperti belum memiliki pengetahuan tentang proses pengajuan





kredit/pembiayaan, namun masalah yang terakhir ini sudah mulai berkurang, karena adanya sosialisasi dari pemerintah dan pihak bank.

Mengatasi kendala-kendala di atas, maka pihak pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait. Seperti dinas koperasi dan usaha kecil, serta perdagangan dan perindustrian harus proaktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada UMKM. Demikian juga, pihak pemerintah perlu membantu memenuhi syarat seperti menyelenggarakan pemilikan sertifikat murah (pronas) dan membantu memfasilitasi UMKM dengan pihak perbankan. Dengan edukasi dan pendampingan, maka UMKM akan memiliki pengetahuan (bankable) yang memadai. Komponen pendukung keberhasilan UMKM yang telah disebutkan akan menjadi parameter untuk menganalisis kesiapan suatu kabupaten/kota yang berada di provinsi Maluku Utara.





DAFTAR PUSTAKA

Best, M (1999), *Cluster dynamics in theory and practise: Singapore/Johor dan penang Electronic*. UNINDO/ISIS.

BPS Kabupaten Halmahera Barat. 2010. *Halmahera Barat Dalam Angka 2010*. BPS dan Bappeda Kabupaten Halmahera Barat. Jailolo.

----- . 2012. *Halmahera Barat Dalam Angka 2012*. BPS dan Bappeda Kabupaten Halmahera Barat. Jailolo.

BPS Kabupaten Halmahera Selatan. 2010. *Halmahera Selatan Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Halmahera Selatan. Labuha.

----- . 2012. *Halmahera Selatan Dalam Angka 2012*. BPS Kabupaten Halmahera Selatan. Labuha.

BPS Kabupaten Halmahera Tengah. 2010. *Halmahera Tengah Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Halmahera Tengah. Weda.

----- . 2012. *Halmahera Tengah Dalam Angka 2012*. BPS Kabupaten Halmahera Tengah. Weda.

BPS Kabupaten Halmahera Timur. 2010. *Halmahera Timur Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Halmahera Timur. Kota Maba.

----- . 2013. *Halmahera Timur Dalam Angka 2013*. BPS Kabupaten Halmahera Timur. Kota Maba.

BPS Kabupaten Halmahera Utara. 2010. *Halmahera Utara Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Halmahera Utara. Tobelo.

----- . 2013. *Halmahera Utara Dalam Angka 2013*. BPS Kabupaten





- Halmahera Utara. Tobelo.
- BPS Kabupaten Kepulauan Sula. 2010. *Kepulauan Sula Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Kepulauan Sula. Sanana.
- . 2012. *Kepulauan Sula Dalam Angka 2012*. BPS Kabupaten Kepulauan Sula. Sanana.
- BPS Kabupaten Pulau Morotai. 2012. *Pulau Morotai Dalam Angka 2011*. BPS Kabupaten Pulau Morotai. Daruba.
- BPS Kota Ternate. 2010. *Kota Ternate Dalam Angka 2010*. BPS Kota Ternate. Ternate.
- . 2012. *Kota Ternate Dalam Angka 2012*. BPS Kota Ternate. Ternate.
- BPS Kota Tidore Kepulauan. 2010. *Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka 2010*. BPS Kota Tidore Kepulauan. Tidore.
- . 2012. *Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka 2012*. BPS Kota Tidore Kepulauan. Tidore.
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2013. *Maluku Utara Dalam Angka 2013*. BPS Provinsi Maluku Utara. Ternate.
- Brata, A.G (2003), Distribusi spasial UKM di masa krisis ekonomi, *Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun II, No.8, Nopember*, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20/
- David, F. R. 2002. *Manajemen Strategis*. Alih bahasa Alexander Sindoro. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Disperindag Kabupaten Halmahera Barat. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Halmahera Barat. Jailolo.





- Disperindag Kabupaten Halmahera Selatan. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Halmahera Selatan. Labuha.
- Disperindag Kabupaten Halmahera Tengah. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Halmahera Tengah. Weda.
- Disperindag Kabupaten Halmahera Timur. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Halmahera Timur. Kota Maba.
- Disperindag Kabupaten Halmahera Utara. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Halmahera Utara. Tobelo.
- Disperindag Kabupaten Kepulauan Sula. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Kepulauan Sula. Sanana.
- Disperindag Kabupaten Pulau Morotai. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kabupaten Kepulauan Sula. Sanana.
- Disperindag Kota Ternate. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kota Ternate. Ternate.
- Disperindag Kota Tidore Kepulauan. 2012. *Direktor, Potensi, dan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012*. Disperindag Kota Tidore Kepulauan. Tidore.





- Gandaniati, Nur Mira Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Dengan Pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif (Studi Kasus Ukm Ozi Aircraft Model, Desa Cikarawang Kabupaten Bogor).
- Kuncoro, M., (2002a), Analisis spasial dan regional: Studi aglomerasi dan kluster industri Indonesia, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Murphy, D., (2000), *Membangun organisasi rakyat*, URM-Indonesia, Jakarta.
- Nasution, A., (2003), *Strategi pembangunan ekonomi baru*, Makalah Dipresentasikan pada Kongres ISEI XV di Malang, 13-15 Juli 2003.
- Nssah, E., (2002), *Assessing the distribution impact of public policy*, Policy Research Working Paper, The Work Bank.
- Rahayu, SL (2005), Analisis peranan perusahaan modal ventura dalam mengembangkan UKM di Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus November 2005.
- Sallatu, A.M dan Suhab, S (2003), Pemberdayaan ekonomi rakyat: Pergulatan mewujudkan keadilan sosial di era otda, *Jurnal Analisis*, Vol. 1, No.1, September.
- Sanusi, Anwar (2004), Tingginya parokialism institusi: Sebuah kasus pengembangan koperasi dan UKM Indonesia, *INOVASI* Vol.1/XVI/Agustus 2004.
- Soetrisno, N., (2003), *Kewirausahaan dalam pengembangan UKM di Indonesia*, Makalah Dipresentasikan pada Kongres ISEI XV di Malang, 13-15 Juli 2003.
- Umar, H. 2003. *Strategic Management in Action*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta





UU No. 24 Th. 1992 *Tentang Penataan Ruang*.

Watterberg, A., S. Sumarto, L. Pritchett. (1999), A national snapshot of the social impact of Indonesia's crisis, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 35 No 3, hal. 145 - 152.



